SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk :

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara;
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
c. pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020;
d. memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Tahun 2020;
e. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk :

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara;
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
c. pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020;
d. memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Tahun 2020;
e. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juli 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 tahun kedua periode lima tahunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun ke II dengan tema *"Maju dan Tangguh"* dan arah pembangunan *"Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur"*. Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2018-2019, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review rencana tata ruang dan wilayah; prinsip *(Sustainable Development Goals/SDGs)* Tahun 2016-2030; dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD menjelaskan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan

bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) .

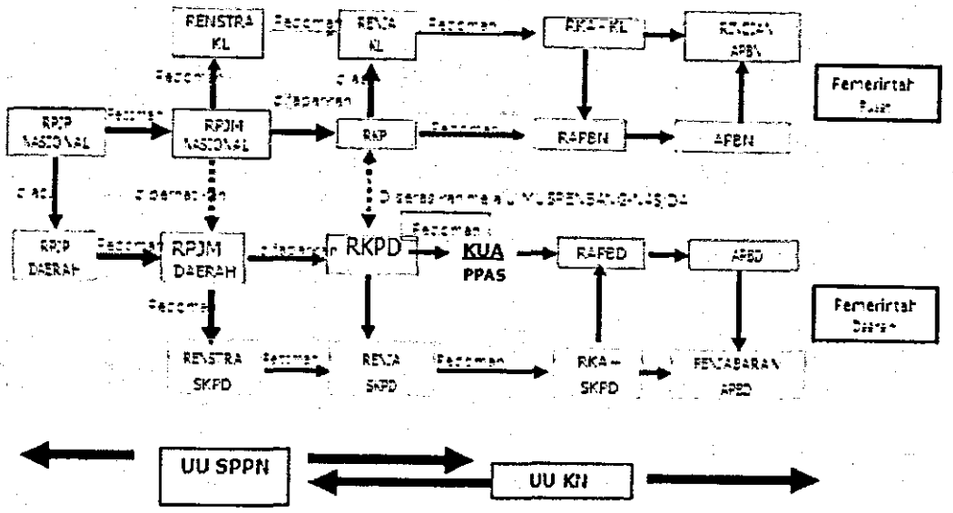

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1. Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai rencana tahunan, mendasarkan pada dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023. Selain itu juga memperhatikan arahan kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, RTRW Provinsi Jawa Tengah, Prinsip SDGs *(Sustainable Development Goals/SDGs)* Tahun 2016-2030, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS).

Sehingga RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional Tahun 2020, dan Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan secara nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah;
b. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2020.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah :

a. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2020 yang sesuai perturan perundangan yang berlaku;
b. tersedianya program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
c. tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
d. tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 disusun berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang meliputi :

- pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen

perencanaan pembangunan serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

- dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang memuat ketentuan/peraturan perundang-undangan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD;
- hubungan rkpd dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD provinsi/kabupaten/kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD provinsi untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota;
- tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan;
- sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bagian ini menjelaskan secara logis tentang :

- gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan;
- permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa, 1.961 Rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan terbesar yang mencapai luas sebesar 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Pembagian Wilayah Adminsitrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Jatipuro	4.036,50	0	10	115	305
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3.	Jumapolo	5.567,02	0	12	114	314
4.	Jumatono	5.355,44	0	11	122	324
5.	Matesih	2.626,63	0	9	124	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	101	347
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	108	297
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	122	300
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	562
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	86	451
11.	Jaten	2.554,81	0	8	114	584
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	119	519
13.	Gondagrejo	5.679,95	0	13	119	507
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	124	391
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	159	467
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	91	279
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
Total		77.378,64	15	162	1.961	6.473

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar, yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo sedangkan untuk luas wilayah yang paling kecil adalah

Kecamatan Colomadu. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

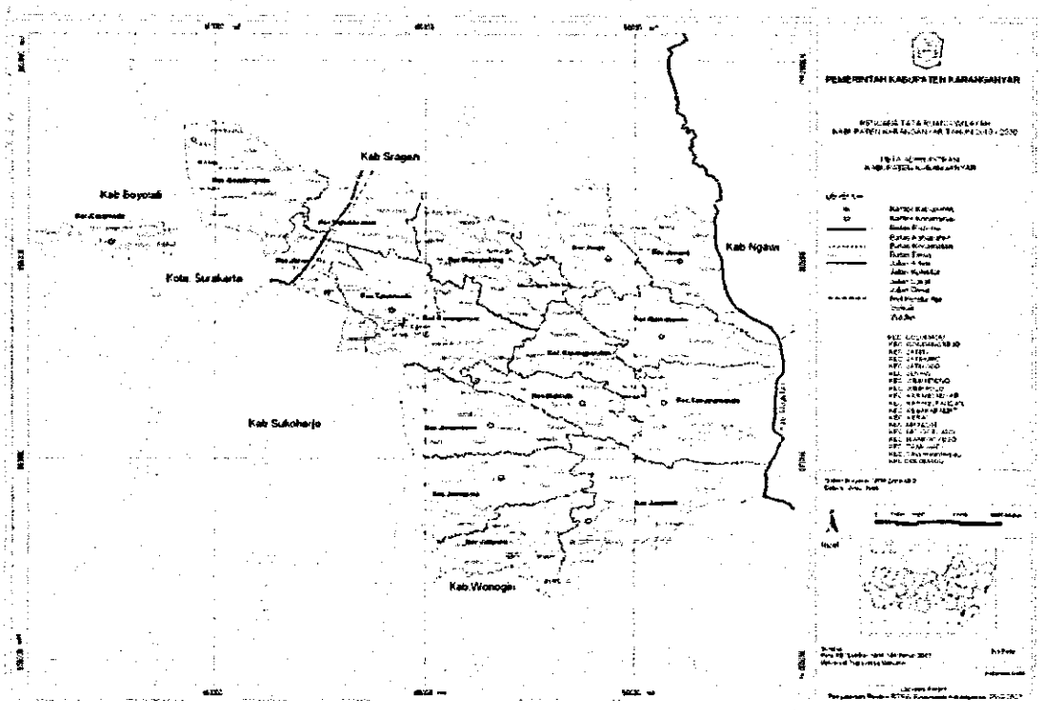

Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Topografi

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl.

Tabel II.2.
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kab. Karanganyar		80	2.000	511

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2018

2.1.3. Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3. Saat ini air, baik air permukaan maupun bawah tanah, semakin membutuhkan perhatian, karena jangka panjang dapat menimbulkan perselisihan antar komponen masyarakat. Kebutuhan untuk air bersih (PDAM), kebutuhan untuk irigasi dan kebutuhan usaha pribadi (privatisasi air / mata air).

Tabel II.3.
Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar
(DAS Bengawan Solo)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M^3/detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah – Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : DPUPR, 2019

2.1.4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah sebanyak 210 hari dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebanyak 26 hari hujan, sedangkan yang terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7 hari hujan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 8.390 mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 2.062 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu sebesar 162 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

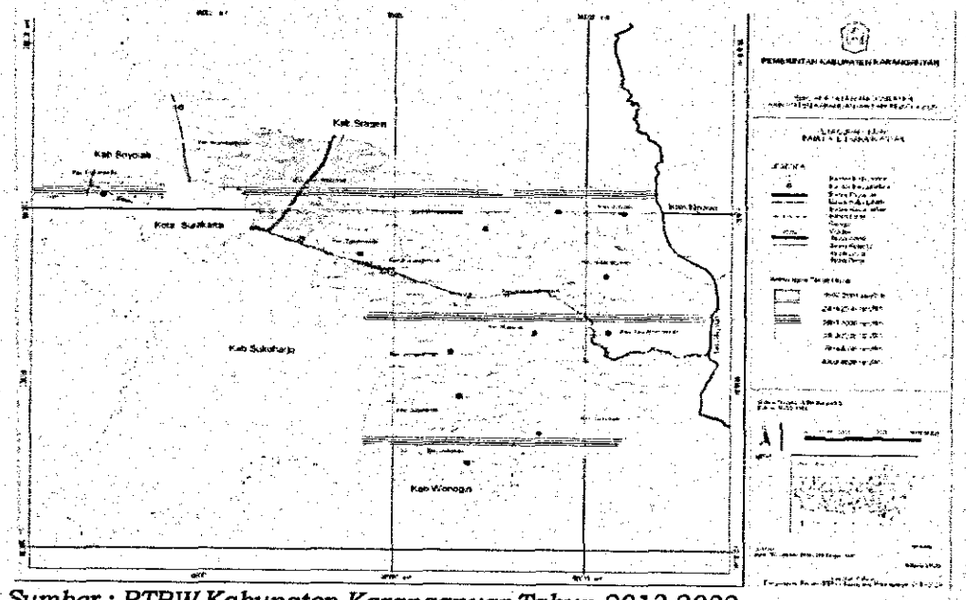

Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.2.
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.4.
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar

Kategori	Desa	Prosen (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan

terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

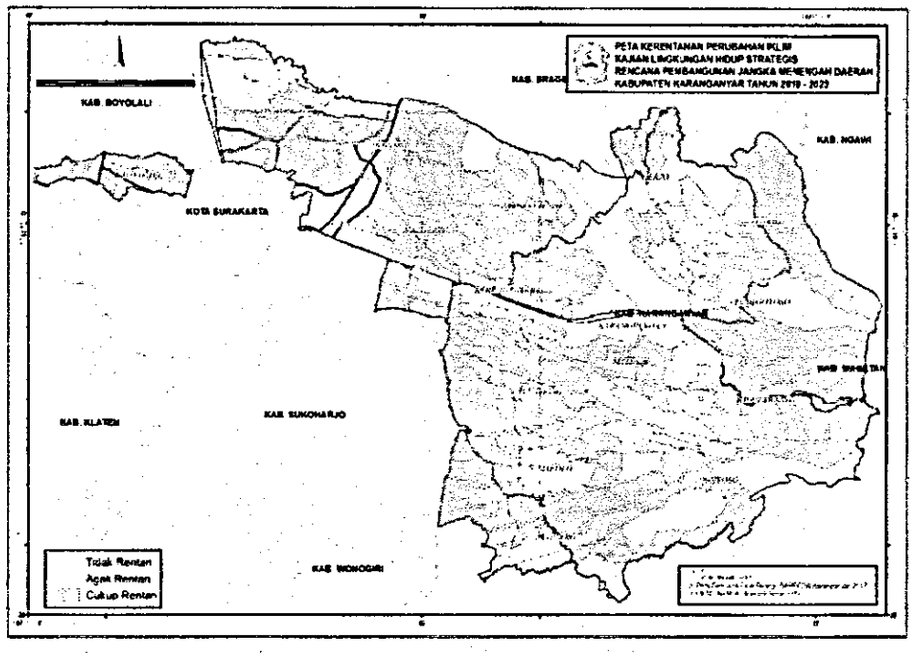

Sumber : KLHS RPJM, 2019

Gambar 2.3.
Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar

2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri tanah sawah 23.092 Ha dan tanah kering 54,286,64 berupa pertanian bukan sawah sebesar 29.685,04 Ha dan bukan lahan pertanian 24.601,60 Ha.

Tabel II.5.
Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
1.	Jatipuro	4.036,50	1.468,00	2.568,26
2.	Jatiyoso	6.716,49	1.294,00	5.422,74
3.	Jumapolo	5.567,02	1.834,00	3.733,02
4.	Jumantono	5.355,44	1.595,00	3.766,44
5.	Matesih	2.626,63	1.287,00	1.339,63
6.	Tawngmangu	7.003,16	719,00	6.283,92
7.	Ngargoyoso	6.533,94	752,00	5.781,94
8.	Karangpandan	3.411,08	1.548,00	1.859,08
9.	Karanganyar	4.302,64	1.720,00	2.582,44
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.682,00	1.241,62
11.	Jaten	2.554,81	1.212,00	1.342,69
12.	Colomadu	1.564,17	462,00	1.055,17
13.	Gondangrejo	5.679,95	1.755,00	4.593,97
14.	Kebakramat	3.645,63	2.083,00	1.471,63
15.	Mojogedang	5.330,90	2.024,00	3.305,09
16.	Kerjo	4.682,27	1.127,00	3.606,27
17.	Jenawi	5.608,28	524,00	5.084,28
	Total	77.378,64	23.092,00	54.286,64

Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka, 2018

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar 2018 menurut peta mencapai 77.378,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastuktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfataan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

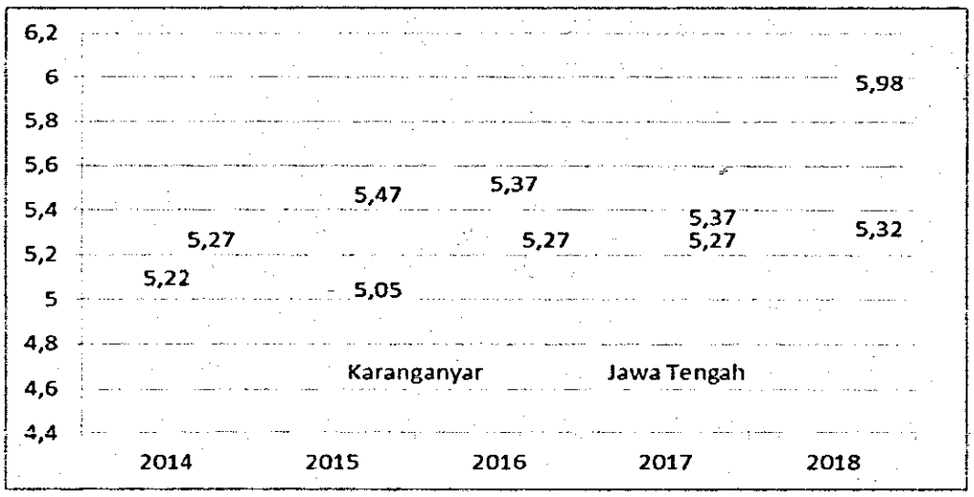

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.4.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun berfluktuasi dari 5,22% (lima koma dua puluh dua persen) pada tahun 2014 menjadi 5,98% (lima koma sempilan puluh delapan persen) pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya/kawasan Subosukawonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2018 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tertinggi mencapai 5,98% (lima koma sempilan puluh delapan persen). Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Wonogiri yaitu 5,41% (lima koma empat puluh satu persen). Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.6.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2014-2018

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Wonogiri	5,30	5,34	5,23	5,23	5,41
2	Klaten	5,79	5,64	5,14	5,14	5,57
3	Sukoharjo	5,40	5,69	5,71	5,71	5,82
4	Surakarta	5,28	5,44	5,32	5,32	5,75
5	Boyolali	5,42	6,08	5,30	5,30	5,72
6	Sragen	5,58	6,05	5,74	5,74	5,75
7	Karanganyar	5,22	5,05	5,37	5,37	5,98
8	Jawa Tengah	5,27	5,47	5,27	5,27	5,32

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.2.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh empat trilyun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 25.150.277.730.000,00 (dua puluh lima trilyun, seratus lima puluh milyar, dua ratus tujuh puluh tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini.

Tabel II.7.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2014	24.635.058,52	10,88%	20.262.444,42	5,22%
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%
2018	34.287.872,56	8,72%	25.150.277,73	5,98%

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2014-2018 meningkat dari Rp. 24.635.058.520.000,00 (dua puluh empat trilyun, enam ratus tiga puluh lima milyar, lima puluh delapan juta, lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tahun 2014 menjadi Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh empat trilyun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Tahun 2018, atau meningkat sebesar Rp. 9.652.814.040.000,00 (sembilan trilyun, enam ratus lima puluh dua milyar, delapan ratus empat belas juta, empat puluh ribu rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.8.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91	4.612.407,76
2.	Pertambangan dan Penggalian	292.753,83	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56
3.	Industri Pengolahan	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	35.770,42	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48
5.	Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.823,63	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90
6.	Konstruksi	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.743.954,18	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67
8.	Transportasi dan Pergudangan	622.539,67	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	797.260,18	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31
10.	Informasi dan Komunikasi	271.522,40	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52
11.	Jasa Keuangan	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
12.	Real Estate	424.736,83	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77
13.	Jasa Perusahaan	77.648,25	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	529.338,06	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30
15.	Jasa Pendidikan	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.681,35	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07
17,	Jasa lainnya	352.026,23	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05
PDRB		24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	34.287.872,56

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp. 20.262.444.420.000,00 (dua puluh trilyun, dua ratus enam puluh dua milyar, empat ratus empat puluh empat juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tahun 2014 menjadi Rp. 25.150.317.630.000,00 (dua puluh lima trilyun, seratus lima puluh milyar, tiga ratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada Tahun 2018, atau meningkat sebesar Rp. 4.887.873.210.000,00 (emapt trilyun, delapan ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh tiga juta, dua ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.9.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.797,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13
3.	Industri Pengolahan	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,80
5.	Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68
6.	Konstruksi	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48	1.705.066,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.198,07
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	662.676,82	697.279,26	732.397,77	771.278,70	828.695,17

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
10.	Informasi dan Komunikasi	294.101,84	315.512,46	338.040,05	365.995,96	427.715,42
11.	Jasa Keuangan	661.493,15	705.929,31	760.048,58	819.720,53	888.659,50
12.	Real Estate	382.272,84	403.183,16	426.366,19	451.138,07	476.205,55
13.	Jasa Perusahaan	65.212,06	70.905,07	77.414,16	84.954,29	93.988,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	427.694,44	441.204,73	450.205,31	459.929,74	469.542,27
15.	Jasa Pendidikan	688.055,98	803.580,33	803.580,33	908.533,43	973.744,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	164.531,82	164.531,82	189.245,46	205.912,76
17,	Jasa lainnya	277.098,01	314.442,75	314.442,75	350.478,69	384.464,47
PDRB		20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05	25.150.317,63

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2014-2018, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

Tabel II.10.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,45	14,89	14,31	13,51	13,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,26	1,24	1,22	1,22
3.	Industri Pengolahan	45,64	45,21	45,78	45,89	45,68
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
5.	Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,7	0,06
6.	Konstruksi	6,34	6,37	6,39	6,58	6,97
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,10	11,06	11,20	11,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,55	2,48	2.60	2,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,27	3,33	3,33	3,19
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,06	1,05	1,09	1,18
11.	Jasa Keuangan	3,37	3,41	3,47	3,62	3,75
12.	Real Estate	1,72	1,74	1,71	1,71	1,71
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,36	0,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	2,10	2.08	2.02	1,93
15.	Jasa Pendidikan	4,32	4,27	4,30	4,39	4,46
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,82	0,82	0,83	0,83
17.	Jasa lainnya	1,43	1,41	1,42	1,41	1,45
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2019

2.2.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2013-2017) menunjukan kondisi yang positif, yaitu pada Tahun 2014 sebesar 6,73% (enam koma tujuh puluh tiga persen) dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 2,36% (dua koma tiga puluh enam persen) (turun), namun realisasi Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 Inflasi Kabupaten Karanganyar naik sebesar 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) poin.

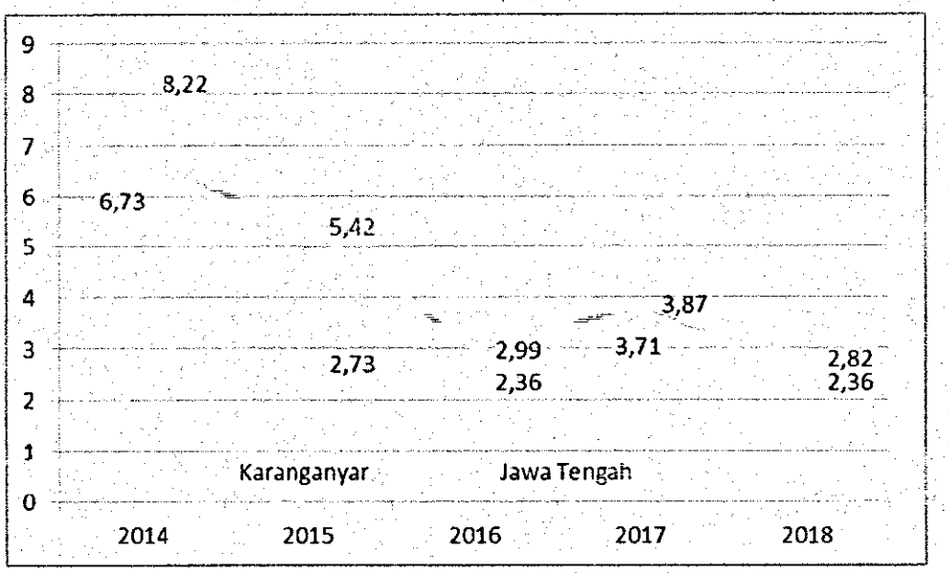

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.5.
Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 2014-2018

Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017 sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen) berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 3,71% (tiga koma tujuh puluh satu persen) dan Nasional 3,61% (tiga koma enam puluh satu persen). Dibandingkan dengan realisasi kabupaten sekitar (wilayah Subosukowonosraten), inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Sukoharjo.

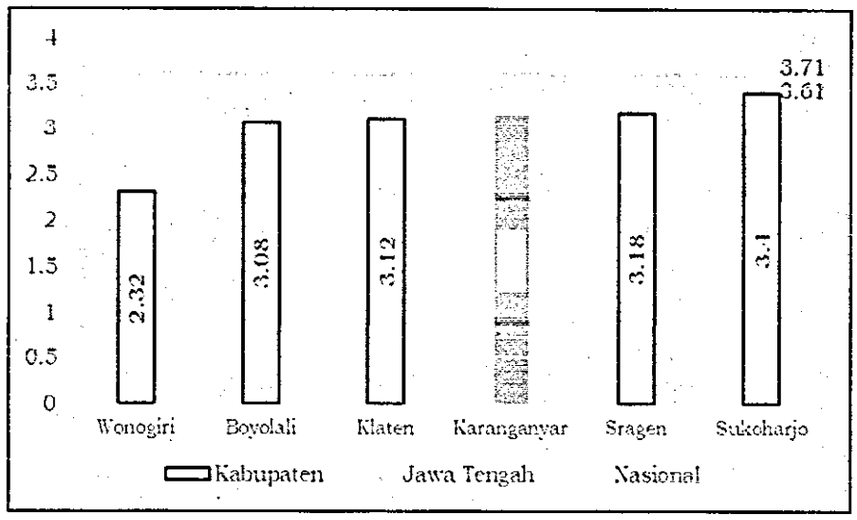

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.6.
Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%)

2.2.4. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 39.004.360,00 (tiga puluh sembilan juta empat ribu, tiga ratus enampuluh rupiah) atau naik sebesar 6,97% (enam koma sembilan puluh tujuh persen) dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan sebear 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen).

Tabel II.11.
PDRB Perkapita Tahun 2014-2018

Tahun	ADHB (Ribu Rupiah)	ADHK 2010 (Ribu Rupiah)
2014	29.040	23.885
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152
2018	39.004,36	28.609,84

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

2.2.5. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada Tahun 2012 menjadi sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) dan pada Tahun 2014 menjadi sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam). Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama

kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan/ pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi ketimpangan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

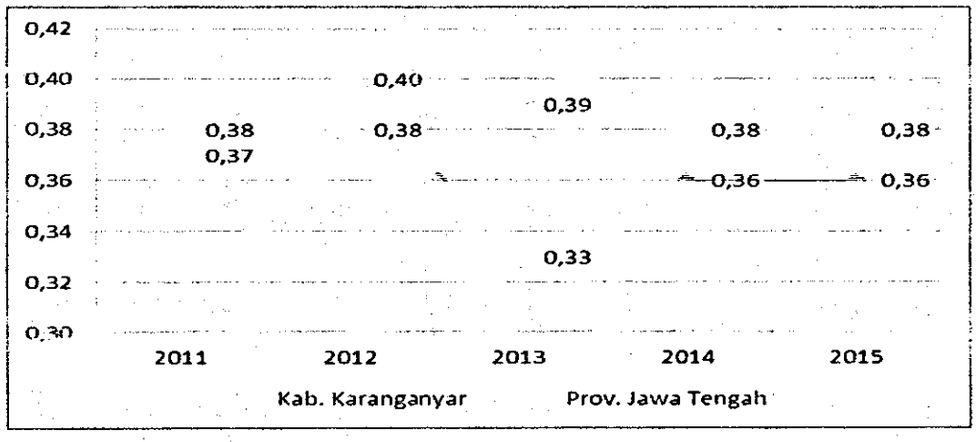

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar 2.7.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan). Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi kelima sama dengan Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

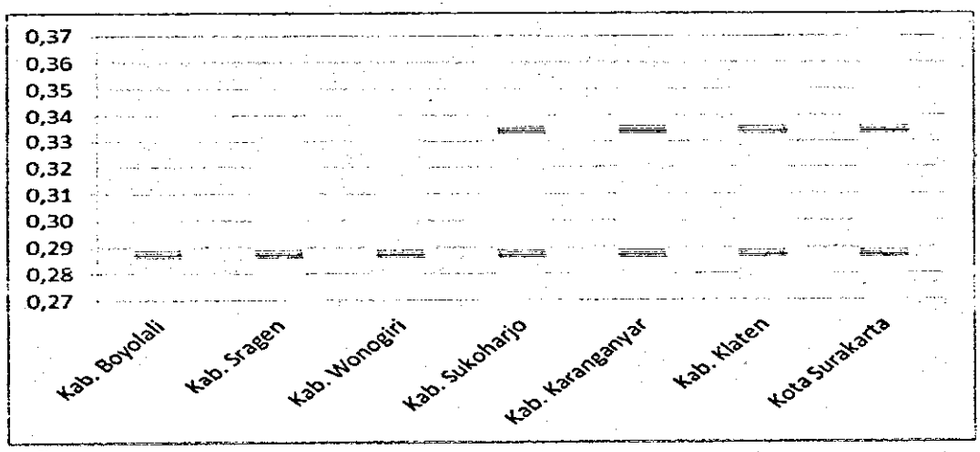

Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.8.
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

2.2.6. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebanyak 107.300 jiwa (seratus tujuh ribu tiga ratus) atau sebesar 12,62% (dua belas koma enam puluh dua persen), dan mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 87.790 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa atau sebesar 10,01% (sepuluh koma nol satu persen). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.12.
Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Kab. Karanganyar		Jawa Tengah (%)	Nasional (%)
	(Ribu Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2014	107,30	12,62	13,58	10,96
2015	106,40	12,49	13,32	11,13
2016	107,70	12,49	13,19	10,70
2017	106,80	12,28	12,23	10,12
2018	87,79	10,01	11,19	9,82

Sumber : BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah tapi masih di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut.

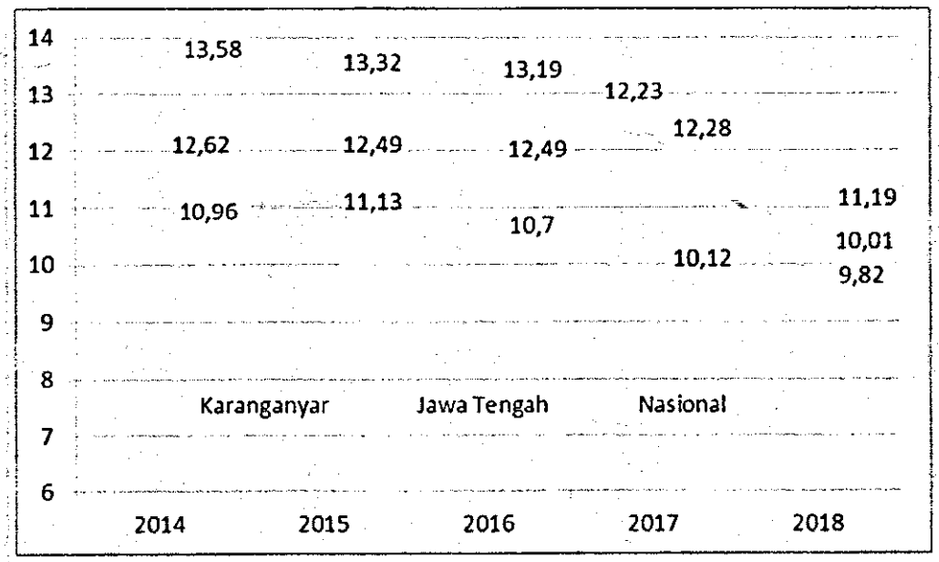

Gambar 2.7.
Persentase Kemiskinan Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 sebesar 2.02 (dua koma nol dua) dan pada Tahun 2018 sebesar 1,70 (satu koma nol tujuh) atau mengalami penurunan sebesar 15,84% (lima belas koma delapan puluh empat persen). Selama kurun waktu lima tahun telah terjadi penurunan cukup signifikan pada Tahun 2015 mencapai sebesar 1,62 (satu koma enam puluh dua) atau menurun sebesar 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen) dibandingkan Tahun 2014, namun terjadi kenaikan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 2,09 (dua koma nol sembilan) atau naik menjadi 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) atau mengalami kenaikan sebesar 22,49% (dua puluh dua koma empat puluh sembilan persen). Kondisi Kedalaman Ekonomi (P1) Kabupaten Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P1 Jawa Tengah dan Nasional.

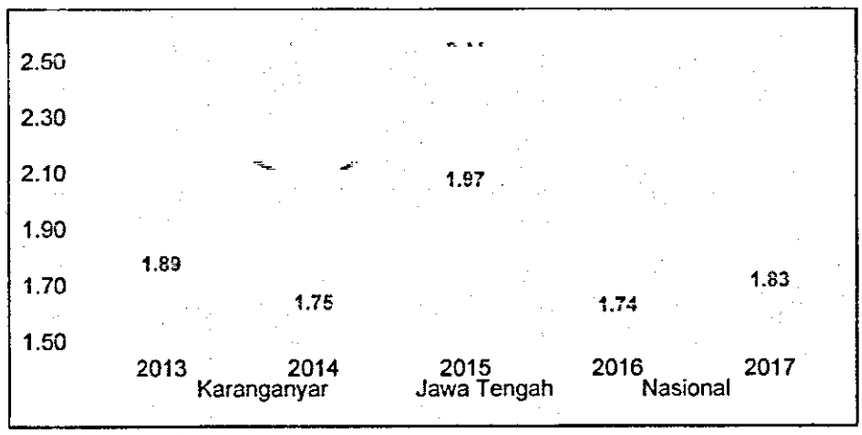

Gambar 2.9.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 sebesar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dan Tahun 2018 sebesar 0,43 (nol koma empat puluh tiga) atau mengalami penurunan sebesar 11,63% (sebelas koma enam puluh tiga persen). Selama kurun waktu lima tahun tersebut terjadi kenaikan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) atau naik menjadi 0,11 (nol koma sebelas) atau naik sebesar 27,50% (dua puluh tujuh koma lima puluh persen) dari Tahun 2015. Kondisi P2 Kabupaten

Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif terhadap lambatnya penurunan capaian P2 Jawa Tengah dan Nasional.

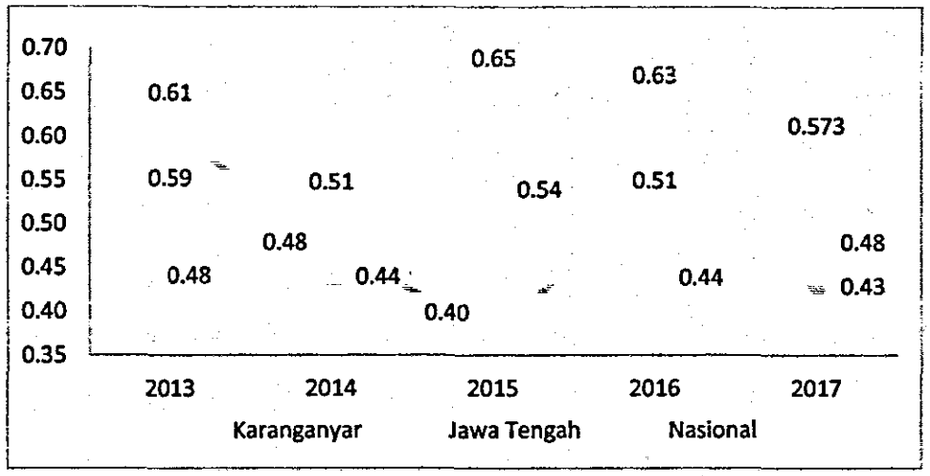

Gambar 2.10.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional

Sedangkan untuk gambaran hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Basis Data Terpadu Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 65.683 RTS. Jumlah RTS terbesar adalah Kecamatan Mojogedang sebanyak 6.556 RTS dan yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya adalah Kecamatan Jatipuro sebanyak 2,579 RTS. Secara rinci jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel II.13.
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	TOTAL
1	Jatipuro	927	839	813	2,579
2	Jatiyoso	1,750	1,141	793	3,684
3	Jumapolo	1,417	1,068	879	3,364
4	Jumantono	1,552	1,463	1,543	4,558
5	Matesih	1,100	1,097	1,147	3,344
6	Tawangmangu	876	1,038	1,104	3,018
7	Ngargoyoso	1,472	1,350	1,103	3,925
8	Karangpandan	1,448	1,455	1,359	4,262
9	Karanganyar	1,237	1,287	1,304	3,828
10	Tasikmadu	1,021	1,363	1,636	4,020
11	Jaten	658	986	1,411	3,055
12	Colomadu	674	797	1,117	2,588
13	Gondangrejo	2,635	1,819	1,765	6,219

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	TOTAL
14	Kebakkramat	1,257	1,496	1,572	4,325
15	Mojogedang	2,608	2,086	1,862	6,556
16	Kerjo	1,210	986	926	3,122
17	Jenawi	1,201	1,049	986	3,236
TOTAL		23,043	21,320	21,320	65,683

Sumber : Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2016

Keterangan :

Desil 1: Rumah Tangga / Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 % terendah di Indonesia;

Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia;

Desil 3 : Rumah angga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia

Data ini menunjukkan fokus wilayah penanganan kemiskinan terbesar ada di Kecamatan Gondangrejo dan Mojogedang, dengan prioritas peningkatan pendapatan kelompok miskin sehingga menurunkan keparahan kemiskinan (P2) dan kedalaman kemiskinan (P1).

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sebesar 2,18% (dua koma delapan belas persen), yaitu dari 73,89 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh sembilan di Tahun 2014 menjadi 75,54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) pada Tahun 2018.

Tabel II.14.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar

Komponen	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	76,71	77,11	77,11	77,31	77,31
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,26	13,27	13,64	13,65	13,67
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,47	8,48	8,49	8,50	8,60
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10.313,38	10.486,00	10.722,00	10.933,00	11.320,00
IPM	Angka	73,89	74,26	74,90	75,22	75,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebesar 75,54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 71,12 (tujuh puluh satu koma dua belas). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

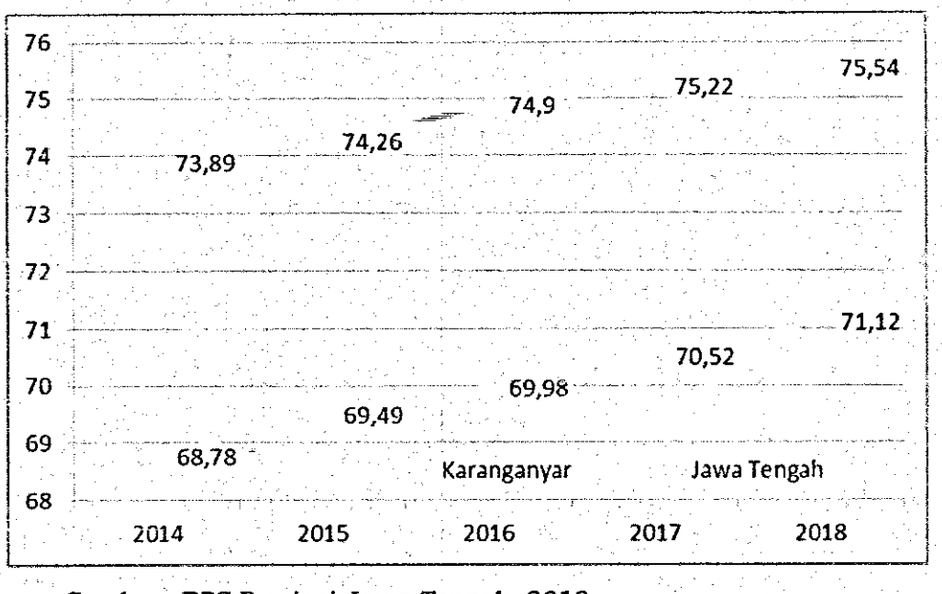

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.11.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dijabarkan berikut ini.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik dari 76,71 (tujuh puluh enam koma tujuh puluh satu) pada Tahun 2014 menjadi 77,31 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu) pada Tahun 2018, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, AHH Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 74,08 (tujuh puluh empat koma nol delapan).

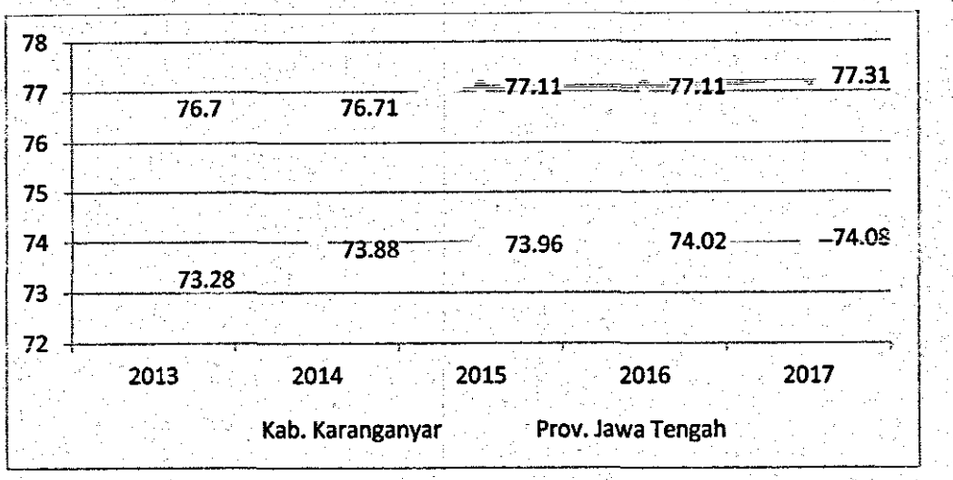

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.12.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari sebesar 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) di Tahun 2014 menjadi 13,67 (tiga belas koma enam puluh tujuh) pada Tahun 2018). Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, HLS Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah.

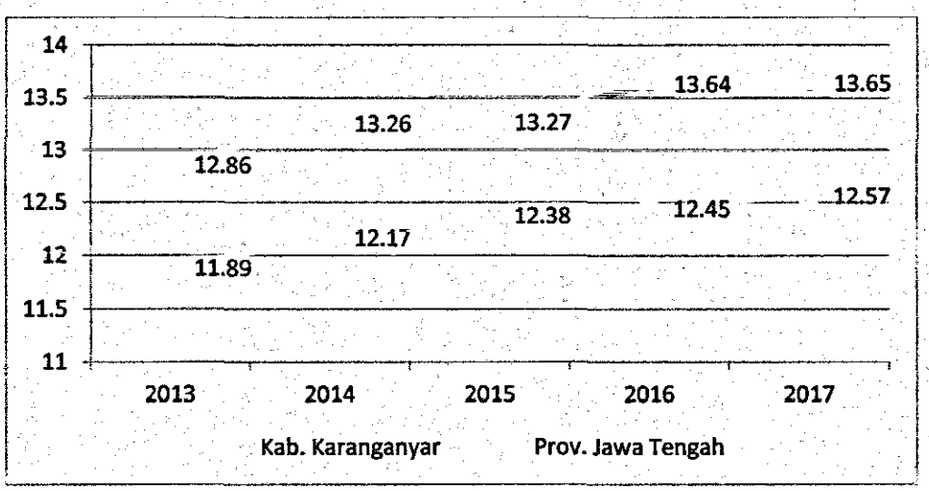

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.13.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2018 meningkat dari 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) Tahun 2014 menjadi 8,55 (delapan koma lima puluh lima) Tahun 2018. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah, dapat dilihat pada Gambar berikut.

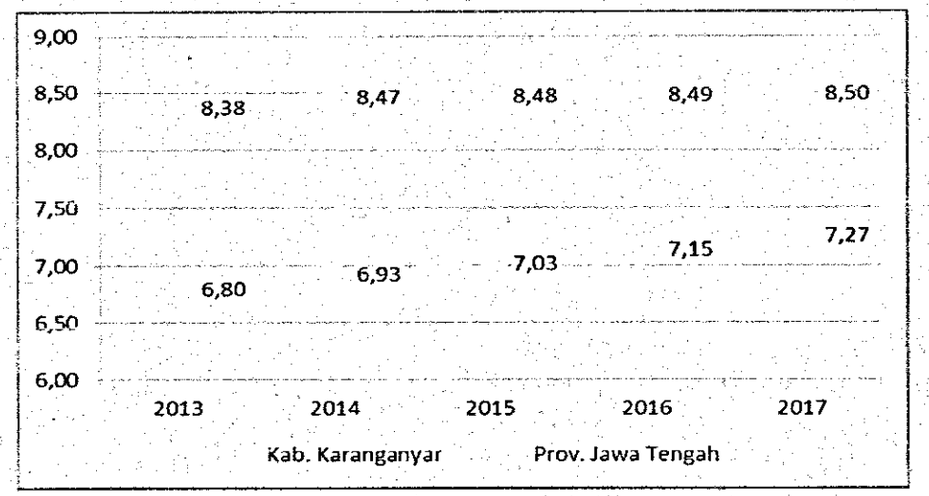

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.14.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.313.380,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Tahun 2014 menjadi Rp. 10.933.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada Tahun 2017, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Karanganyar mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut.

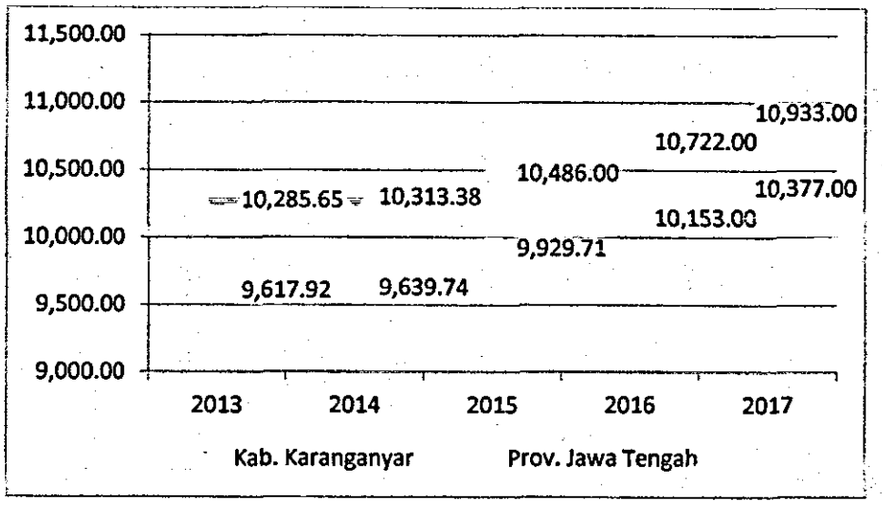

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.15.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2.2.8. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 adalah 42,01 (empat puluh dua koma nol satu)_per 100.000 KH, angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 88,58 (delapan puluh delapan koma lima puluh delapan) per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan pre eklamsi serta infeksi kehamilan/sepsis. Gambaran selegkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.15.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	AKI (Kab. Karanganyar)	AKI (Prov. Jawa Tengah)
2013	138,48	118,62
2014	123,32	126,55
2015	77,58	111,16
2016	72,60	109,65

2017	42,01	88,58
2018	42,01	Na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

2.2.9. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, dimana AKB pada Tahun 2013 sebesar 10,50 (sepuluh koma lima puluh) per 1.000 KH, dan Tahun 2018 sebesar 8,15 (delapan koma lima belas) per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspeksi serta penyakit konginetal. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.16.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	AKB (Kab. Karanganyar)	AKB (Prov. Jawa Tengah)
2013	10,50	10,41
2014	12,80	10,08
2015	13,96	10,00
2016	12,41	9,99
2017	8,51	8,93
2018	8,15	na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2019

Angka kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup

sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan berobat.

2.2.10. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelainan konginetal. AKABA di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan cenderung meningkat. Namun demikian capaiannya masih lebih baik dari AKABA Provinsi Jateng, walaupun demikian kita perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sebab seberapapun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Balita salama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.17.
Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun	AKB (Kab. Karanganyar)	AKB (Prov. Jawa Tengah)
2013	1,31	11,00
2014	1,77	11,54
2015	2,17	11,64
2016	1,84	11,80
2017	1,00	10,47
2018	1,00	na

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar 2019

2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Gizi Buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di Kabupaten Karanganyar, prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan peningkatan kewaspadaan. Namun demikian prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang di tetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.18.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2018

Tahun	Prevalensi (%)
2013	0,042
2014	0,041
2015	0,040
2016	0,025
2017	0,030
2018	0,030

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

2.2.12. Penyakit Menular

Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.19.
Kondisi Penyakit Menular Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Angka Penemuan kasus TB Paru (%)	51,38	57,80	64,73	74,50	74,50
2. Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	100	100	100	137	137
3. Insiden Rate DBD (per 100.000 penduduk)	36,4	57,0	15,2	8,3	8,52
4. Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk)	14	11	3	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan, namun demikian masih perlu diwaspasai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan TB dan HIV AIDS merefleksikan kebiasaan perilaku sehat dimasyarakat perlu menjadi perhatian lebih.

2.1.1. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum, dibedakan ke dalam Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Penunjang Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup (1)Pendidikan; (2)Kesehatan; (3)Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup (1)Tenaga kerja; (2) Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan hidup; (6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa; (7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) Perhubungan; (9) Komunikasi dan informatika; (10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; (11) Penanaman modal; (12) kepemudaan dan olah raga; (13) statistik; (14) persandian; (17) kebudayaan; (18) perpustakaan; (19) kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan mencakup (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) perdagangan; (5) perindustrian; (6) transmigrasi.

Urusan Penunjang Pemerintah mencakup (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan pengembangan; (6) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Kabupaten Karanganyar fungsi (6) dipecah menjadi (1) pengawasan dan (2) administrasi pemerintahan.

2.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya

saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. Di sinilah peran daya saing sangat dibutuhkan. *European Commission* memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam *Regional Competitiveness Index (RCI)* didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah.

2.4.1 Institusi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara institusi merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini ditunjukkan dengan adanya prestasi dibidang pengelolaan pemerintahan, yaitu opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pencapaian prestasi ini didukung dengan penilaian SAKIP yang semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, dan B pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan penghargaan juara nasional dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) dan penghargaan Paramasamya Nugraha.

2.4.2 Kondisi Makro Ekonomi

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 2 tahun terakhir 2017 dan 2018 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebesar 2,36% berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 2,82%. Perkembangan

PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

2.4.3 Infrastruktur

Kondisi jalan dan jembatan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga Tahun 2018, total panjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang 964,93 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 20,4 km, jalan Provinsi 98,55 km, dan jalan kabupaten sepanjang 845,98 km. Sedangkan untuk jumlah jembatan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 206 buah dengan total panjang 1.749,10 m.

Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik.

Tabel II.20.
Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

No	Jenis/Kualitas Jalan	Panjang Jalan (Km)		
		Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Kondisi Jalan			
	a. Baik	20,40	49,81	537,76
	b. Sedang		56,30	216,49
	c. Rusak			110,28
	d. Rusak Berat			11,97

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Dilihat dari komposisi penduduk yang ada menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan Kabupaten Karanganyar sebesar 65,11 (enam puluh lima koma sebelas), artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 65 orang penduduk usia tidak produktif. Angka rasio ketergantungan untuk penduduk usia muda 58,79 (lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan untuk penduduk usia tua 24,05 (dua puluh empat koma nol lima), dengan demikian Kabupaten Karanganyar telah

terjadi bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya bonis demografi ini akan menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan benar.

2.4.5 Keamanan dan Kemudahan berinvestasi

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat sepert pada Tabel II.21.

Tabel II.21.
Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2013-2017

No	Kejahatan/ Pelanggaran	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perkosaan (Pasal 285)	2	1	0	1	1	-
2	Perzinahan (Pasal 287)	1	2	1	0	3	-
3	Pembunuhan (Pasal 340)	0	0	1	0	0	-
4	Penganiayaan (Pasal 351)	20	11	16	5	14	-
5	Pencurian Biasa (Pasal 362)	33	37	31	21	28	-
6	Pencurian Pemberatan (Pasal 363)	62	62	60	50	32	-
7	Pencurian Kekerasan (Pasal 365)	5	7	6	9	3	-
8	Penggelapan (Pasal 372)	44	46	33	21	12	-
9	Penipuan (Pasal 378)	75	72	55	23	23	-
10	Curanmor	8	18	15	16	15	-
11	Lain-lain	0	59	98	93	52	-

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan.

2.1.1. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan dari 56 indikator masih terdapat 2 dengan capaian indikator yang sangat rendah dan rendah. Indikator tersebut

adalah Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs. Capaian indikator Urusan Pendidikan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.22.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pendidikan

No	Indikator Capaian	2018
1	APK PAUD/TK (4-6 th)	97,75
2	APK PAUD (0-6 th)	70,40
3	Lembaga PAUD yang terakreditasi	60
4	APK SD/SDLB/MI/Paket A	116,88
5	APM SD/SDLB/MI/Paket A	107,92
6	APK SMP/SPMLB/MI/Paket B	111,08
7	APM SMP/SPMLB/MTs/Paket B	97,43
8	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,01
9	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,04
10	Angka Kelulusan SD/MI	100
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	100
12	Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI	70,00
13	Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs	7,0
14	Ruang Kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan	93,30
15	Ruang Kelas SMPLB/MTs sesuai standar nasional pendidikan	95,28
16	SD/MI yang memiliki perpustakaan standar	95,30
17	SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar	97,47
18	SD/MI yang memiliki sanitasi layak	84,76
19	SMP/MTs yang sanitasi layak	88,40
20	SD yang melaksanakan kurikulum 2013	100
21	SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	100
22	APK SMA/SMALB/MA Paket C	76,46
23	APM SMA/SMALB/MA Paket C	64,80
24	Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA	0,03
25	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,96
26	Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK	7,0
27	Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	87,50
28	SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar	74,51
29	SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak	70,17
30	SMA yang melaksanakan kurikulum 2013	100
31	Angka Lulus pendidikan kesetaraan paket A	100
32	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	100
33	Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C	100
34	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	18
35	Persentase Buta Aksara >15 tahun	0,01
36	Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM	100
37	Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi	100
38	Persentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan dari program inklusi	65

No	Indikator Capaian	2018
39	Persentase Pendidik PAUD berkualitas S1/D4	64,73
40	Persentase Pendidik SD/SDLB berkulaitas S1/D4	84,84
41	Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualitas S1/D4	90,99
42	Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualitas S1/D4	96,50
43	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	81,91
44	Persentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik	86,60
45	Persentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	89,47
46	Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik	87,22
47	SD/SDLB/MI yag terakreditasi	100
48	SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100
49	SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi	100
50	SD/Mi melaksanakan MBS dengan baik	100
51	SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik	100
52	SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100
53	Perguruan tinggi yang terfasilitasi	2
54	Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan	100
55	Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka	100
56	Persentase pengetahuan siswa tentang nilai seni dan budaya	100

Sumber : Disdikbud, 2019

2. Kesehatan

Capaian indikator urusan kesehatan sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan dari 32 indikator masih terdapat 13 indikator dengan kategori capaian sangat rendah. Capaian kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.23.
Pencapaian Target Capaian Urusan Kesehatan

No	Indikator Capaian	2018
1	Angka Kesakitan	Na
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
3	Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	137
4	Angka Penemuan kasus TB Paru	74,5
5	Angka Penemuan kasus Malaria (API)	1,00
6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,3
7	AKI	42,01
8	AKB	8,15
9	AKABA	1,00
10	Cakupan dan jenis pelayan an kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	9,14
11	Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi	21
12	Jumlah RS yang sudah terakreditasi	4
13	Jumlah klinik yang sudah terakreditasi	Na
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
15	Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa)	11,4

No	Indikator Capaian	2018
16	Angka Penemuan kasus TB Paru	74,5
17	Rasio balita per satuan Posyandu	22
18	Rasio dokter per satuan penduduk	1/14878
19	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1/27181
20	Rasio perawat per satuan penduduk	1/1189
21	Rasio bidan per satuan penduduk	1/1765
22	Ratio Rumah Sakit	1/ 110.000
23	Ratio Puskesmas	1/43143
24	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,3
25	Rumah tangga sehat	90,23
26	Persentase Unmet *Need*	4,18
27	Angka Prevalensi Gizi Buruk	0,03
28	Jumlah Puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan sesuai standar	21
29	Jumlah RS yang mempunyai fasilitas sesuai standar	8
30	Jumlah Klinik yang mempun yai fasilitas sesuai standar	36
31	Pembangunan Rumah Sakit (BLUD)	0
32	Dukungan sarpras pelayan an kesehatan rujukan di RS	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Karanganyar Tahun 2019

3. Pekerjan Umum

Indikator capaian kinerja untuk urusan pekerjaan umum di Kabupaten Karanganyar sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.24.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Capaian	2018
1	Proporsi panjang jalan dengan lebar ≥ 6 m	9,30
2	Proporsi panjang jembatan dengan lebar ≥ 9 m	4,00
3	Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)	8,6
4	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	135
5	Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali	30
6	Panjang saluran jalan / gorong-gorong jalan yang dibangun	1320
7	Proporsi panjang saluran drainase	11,80
8	Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun	10000
9	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	78,38
10	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	84,50
11	Proporsi Panjang jalan yang terpetakan dalam Sistem Informasi Jalan berbasis GIS	100,00
12	Meningkatnya proporsi panjang jalan yang sudah dileger	58,14
13	Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ	4,00
14	Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman	4,00
15	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	77
16	Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	46
17	Embung yang diinginkan (17 buah)	7
18	Proporsi sarana dan prasarana sanitasi	70,14

No	Indikator Capaian	2018
19	Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	89,87
20	Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan	76
21	Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	78
22	Proporsi Pembangunan Gedung Perkantoran	58
23	Proporsi Pengembangan Ketenagalistrikan	30,25
24	Proporsi Pengawasan Pengelolaan Air Tanah	30,5

Sumber : DPUPR Kab Karanganyar Tahun 2019

4. Perumahan Rakyat

Capaian indikator urusan Perumahan Rakyat sampai dengan Tahun 2018 untuk pembangunan rumah tidak layak huni baru mencapai 66,72% (enam puluh enam koma tujuh puluh dua).

Tabel II.25.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Capaian	2018
1	Proporsi fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu	
2	Proporsi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	
3	Pembangunan rumah tidak layak huni	66,72%

Sumber : Evaluasi RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2013 – 2018 (diolah Tim Penyusun)

5. Penataan Ruang

Capaian indikator urusan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2018 belum menunjukkan kineja yang baik, dari 3 indikator 2 dalam kategori sangat rendah dan 1 indikator dalam kategori rendah.

Tabel II.26.
Pencapaian Target Capaian Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah Dokumen DED (RAB & Gambar)	1
2	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan (RTBL)	6
3	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTR)	9

Sumber : Baperlitbang Kab Karanganyar Tahun 2019 (diolah Tim Penyusun)

6. Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.27.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Capaian	2018
1	Tersedianya Dokumen data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	100
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	100

No	Indikator Capaian	2018
4	Proporsi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85

Sumber : Baperlitbang Kab Karanganyar Tahun 2019

7. Perhubungan

Capaian urusan perhubungan sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 22 indikator yang ditetapkan sebanyak 6 indikator dengan capaian sangat tinggi, sedangkan 8 indikator lainnya menunjukkan capaian yang masih rendah dan sangat rendah dan yang capaiannya sedang ada 2 indikator. Capaian kinerja urusan perhubungan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.28.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perhubungan

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah alat uji yang terpelihara	9
2	Jumlah Terminal yang terpelihara	10
3	Jumlah Traffic light	21
4	Jumlah lampu flashing	47
5	Jumlah Rambu yang diperbaiki	-
6	Jumlah posko Angkutan lebaran	7
7	jumlah pengadaan rambu - rambu lalu lintas	1463
8	jumlah pengadaan RPPJ	28
9	Jumlah pengadaan Marka jalan	1658
10	jumlah pengadaan Guardrill	-
11	Jumlah pengadaan traffic light	-
12	Jumlah pengadaan lampu flashing	5
13	jumlah pengadaan paku jalan	-
14	Jumlah Pengadaan Delineator	-
15	Jumlah pengadaan Moving display	3
16	Jumlah pengadaan Kamera CCTV/ATCS	9
17	Jumlah pengadaan Traffic cone	-
18	Jumlah uji KIR	1101
19	Frekuensi penertiban dan pemeriksaan kendaraan	16
20	Frekuensi pengamanan lalulintas	99
21	Frekuensi Patroli lalulintas	12
22	Jumlah ijin dispensasi jalan	-

Sumber : Dinas Perhubungan PKP Kab Karanganyar Tahun 2019

8. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar sampai dengan Tahun 2018 mempunyai target sebanyak 21 indikator dimana terdapat 8 indikator dengan tingkat capaian yang rendah dan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya terkait dengan capaian kinerja urusan lingkungan hidup Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.29.
Pencapaian Target Capaian Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Capaian	2018
1	Terkendalinya permasalahan persampahan di Kabupaten Karanganyar	8
2	Meningkatnya pelayanan operasional kebersihan dan keindahan	30
3	Terwujudnya pemeliharaan kontainer sampah	20
4	Terwujudnya material control landfill yang digunakan untuk TPA	2747
5	Terwujudnya lahan TPA yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah	8
6	Terwujudnya TPS di Kabupaten Karanganyar	20
7	Terkelolanya sampah dengan prinsip 3R	35
8	Proporsi tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	65
9	Terwujudnya sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk difabel	0
10	Terwujudnya hutan kota yang dapat untuk mendukung program "Go-Green"	1
11	Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)	0,20
12	Proporsi jumlah lampu penerangan jalan/sarana umum yang telah terpasang dan dipelihara dengan baik	Na
13	Informasi status mutu air (SPM)	6
14	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	14
15	Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	100
16	Jumlah penerbitan pengelolaan Limbah B3	84
17	Persentase jumlah industri yang mengelola lingkungan sesuai dokumen lingkungan	0,95
18	Persentase jumlah usaha yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang LH	0,9
19	Jumlah IPAL sebagai upaya penurunan emisi GRK	29
20	Penanaman tanaman ungggulan lokal daerah/tanaman lokal (jenis)	30
21	Konservasi air bawah tanah melalui pembuatan sumur resapan dan biopori	5.945

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Karanganyar Tahun 2019

9. Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.30.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanahan

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah tanah aset Pemkab yang bersertifikat	*729*
2	Jumlah data tanah Pemerin tah Kabupaten Karanganyar terinventarisir	

Sumber : Evaluasi RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2013 – 2018 (diolah Tim Penyusun)

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 menunjukkan dari 3 indikator, 2 indikator dengan

capaian sangat tinggi dan satu indikator dengan capaian sangat rendah.

Tabel II.31.
Pencapaian Target Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Capaian	2018
1	Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat karanganyar	915.811
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	72,50
3	Tersedianya SDM yang memadai dalam rangka pengelolaan dan pengembann SIAK	51

Sumber : Disdukcapil Tahun 2019

11. Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA)

Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 terhadap target RPJMD ada 4 indikator yaitu terwujudnya Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) di Kabupaten Karanganyar, Persentase peran perempuan di lembaga pemerintah, Persentase keterwakilan perempuan di DPRD, Terbentuknya Posyandu terpadu. Hasil capaian kinerja dari 4 indikator tersebut adalah sebagai berikut 3 indikator dengan capaian sangat tinggi dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah

Tabel II.32.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Capaian	2018
1	Terwujudnya Penghapusan Buta Aksara perempuan (PBAP) di Kab Karanganyar	100
2	Persentase peran perempuan di lembaga pemerintah	55,16
3	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	12
4	Terbentuknya Posyandu terpadu	51

Sumber : Dinas P3APPKB Kab Karanganyar Tahun 2019

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian indikator kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 ditunjukkan dengan 13 indikator. Hasil capaian kinerja yang telah dilakukan adalah sebanyak 12 indikator memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator memiliki capaian sedang.

Tabel II.33.
Pencapaian Target Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator Capaian	2018
1	PUS menjadi Peserta KB Aktif	81,70
2	PUS terlayani peserta KB Baru	53,12

No	Indikator Capaian	2018
3	Menurunnya Unmetneed	8,48
4	Menurunnya Peserta KB DO	9,83
5	Meningkatnya Peserta KB Aktif Pria	3,71
6	Terlayaninya peserta KB Implan	12.330
7	Terlayaninya peserta KB Baru MOW	2.132
8	Terlayaninya peserta KB MOP	597
9	Meningkatnya jumlah pengelola IMP terhadap program KB	8287
10	Adanya 5 kelompok BKB di setiap Desa/Kelurahan	953
11	Adanya 2 kelompok BKR di setiap Desa/Kelurahan	388
12	Adanya 2 kelompok BKL di setiap Desa/Kelurahan	444
13	Adanya Klp Bina Keluarga percontohan di setiap Kecamatan-	102

Sumber : Dinas P3APPKB Kab Karanganyar Tahun 2019

13. Sosial

Capaian indikator kinerja urusan sosial Tahun 2018 dari 8 indikator sebanyak 4 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan tinggi, sedangkan 3 indikator menunjukkan capaian yang sangat rendah dan 1 indikator capaiannya sedang. Berikut capaian kinerja urusan sosial Tahun 2018.

Tabel II.34.
Pencapaian Target Capaian Urusan Sosial

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah PMKS	49434
2	Jumlah panti asuhan	16
3	Jumlah panti jompo	1
4	Jumlah anak penghuni panti asuhan	502
5	Jumlah penghuni panti jompo	41
6	Jumlah WTS dan PGOT terazia/terbina	85
7	Jumlah peserta jambore pemuda	0
8	Jumlah peserta napak tilas joko songo	0

Sumber : Dinas Sosial Kab Karanganyar Tahun 2019

14. Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 3 indikator dan tabel berikut adalah capaiannya

Tabel II.35.
Pencapaian Target Capaian Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Capaian	2018
1	Tenaga Kerja Siap Pakai	1352
2	Penyerapan Tenaga Kerja	2800
3	Lembaga Ketenagakerjaan Terlindungi	5

Sumber : DISDAGNAKERKOP UKM Kab Karanganyar Tahun 2019

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun 2018 ada 6 indikator dengan hasil capaian adalah sebanyak 2 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian tinggi dan 2 dengan capaian rendah. Berikut capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun 2018.

Tabel II.36.
Pencapaian Target Capaian Urusan Koperasi dan UKM

No	Indikator Capaian	2018
1	Tumbuhnya wirausaha baru	4.362
2	Meningkatnya pengetahuan UMKM	344
3	Persentase Koperasi sehat	125
4	Persentase Koperasi aktif	820
5	Jumlah produk / komoditas OVOP	4
6	Pengembangan Klaster UMKM	2

Sumber : DISDAGNAKERKOP UKM Kab Karanganyar Tahun 2019

16. Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 terhadap target RPJMD menunjukkan dari 3 indikator ada 1 indikator yang menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu Meningkatnya jumlah perusahaan dan 2 indikator menunjukkan capaian yang sangat rendah yaitu Meningkatnya jumlah pemohon izin dan Meningkatnya jumlah investasi. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal terhadap target RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018.

Tabel II.37.
Pencapaian Target Capaian Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Capaian	2018
1	Meningkatnya jumlah pemohon izin	500
2	Meningkatnya jumlah perusahaan	94
3	Meningkatnya jumlah investasi	1722

Sumber : DPMPTSP Kab Karanganyar Tahun 2019

17. Kebudayaan

Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan Tahun 2018 menunjukkan dari 6 indikator, terdapat 3 indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan 3 indikator sangat rendah. Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan :

Tabel II.38.
Pencapaian Target Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah Monumen dan TMP yang terawat dan dilestarikan	18
2	Terlestarinya benda cagar budaya	121
3	Terselenggaranya festival Seni Tradisi lisan	18
4	Festival/ parade seni dan budaya	25
5	Meningkatnya Festival Apresiasi seni budaya anak	30
6	Meningkatnya festifal seni budaya daerah	25

Sumber :Disdikbud, 2019 (diolah Tim Penyusun)

18. Pemuda Olahraga

Capaian indikator kinerja urusan pemuda olahraga Tahun 2018, sebagaimana berikut :

Tabel II.39.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah kebijakan/ perun dangan yang tersosialisasi	2
2	Jumlah peserta jambore pemuda	400
3	Jumlah peserta napak tilas joko songo	0
4	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi	26
5	Terealisasinya kegiatan pramuka	0
6	Terealisasinya bantuan pembinaan prestasi	88
7	Jumlah organisasi pemuda yang produktif	25
8	Jumlah perolehan Medali	130
9	Jumlah atle tterpilih di tingkat provinsi dan tingkat nasional	113

Sumber : Dinas Pariwisata Oemuda dan Olahraga Kab Karanganyar Tahun 2019

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Berikut capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Tahun 2018.

Tabel II.40.
Pencapaian Target Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Indikator Capaian	2018
1	Persentase Golput	-
2	Persentase Penggunaan Hak Suara	-
3	Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat	100

Sumber : KESBANGPOL Kab. Karanganyar 2019

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Capaian urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.41.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah Kecamatan Penyelenggara PATEN	0
2	Terpilihnya Kepala Desa baru	11
3	Terisinya kekosongan jabatan Perangkat Desa	517
4	Tersusunnya Raperda dan Raperbup mengenai Pemerintahan Desa	34
5	Terlaksananya pembangunan desa dan masyarakat Desa serta meningkatnya penyelenggara an pemerintahan desa	162
6	Presentase penanganan permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	24
7	Jumlah Perda yang disusun	71
8	Jumlah produk hukum non perda yang terselesaikan	3.860
9	Jumlah Evaluasi Produk Hukum Desa yang terselesaikan	810
10	Tersedianya sarana hot spot internet bagi masyarakat	9
11	Terlaksananya Sistem Adminis trasi Perkantoran Maya di seluruh SKPD	0
12	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim II	8
13	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim III	29
14	Jumlah PNSyang lulus seleksi Diklat Pim IV	29
15	Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat	708
16	Jumlah CPNS yg lulus Diklat Prajabatan	508
17	Jumlah PNS paham materi diklat	597
18	Jumlah Camat yang lulus Diklat Camat	5
19	Jumlah Bendaharawan Daerah yang lulus Diklat	40
20	Jumlah ajuan Perkawinan maupun Perceraiannya terselesaikan	85
21	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yg terselesaikan	32
22	Jumlah PNS teladan yang terpilih	0
23	Meningkatnya presentase satuan kerja nilai LAKIP- minimal baik	62,38
24	Optimalisasi penerimaan PBB	421.352
25	Optimalisasi penerimaan PAD	14.806

Sumber : OPD Kab Karanganyar Tahun 2019

21. Ketahanan Pangan

Capaian indikator kinerja urusan ketahanan pangan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.42.
Pencapaian Target Capaian Urusan Ketahanan Pangan

No	Indikator Capaian	2018
1	Meningkatnya ketersediaaan dan ketahanan pangan masyarakat	213.485
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	77
3	Meningkatnya sarana prasaran ketahanan pangan masyarakat	17
4	Terbinanya kelompok kelompok tani	17
5	Meningkatnya usaha pengolahan pangan lokal	60
6	Terbinanya pedagang/pelaku pangan strategis	260

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Karanganyar Tahun 2019

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2018 ditunjukkan dengan 11 indikator. Dari 11 indikator tersebut sebanyak 3 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, dan 8 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.43.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Capaian	2018
1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif	47
2	Jumlah kelembagaan kel. adat yang terbina	11
3	Pengembangan dan penambahan modal usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K-PKK)	157
4	Jumlah koordinasi dewan penyantun TP-PKK	24
5	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	500
6	Jumlah posyandu yang meningkat pelayanannya	17
7	Jumlah kader PKK yang terlatih	2655
8	Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	17
9	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat	400
10	Terwujudnya standarisasi pelatihan PMD	0
11	Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari	400

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kab Karanganyar 2019

23. Statistik

Capaian indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 1 indikator yaitu Tersedianya Data Statistik Umum, Dasar dan Sektoral skala Kabupaten, dengan capaian sangat tinggi.

Tabel II.44.
Pencapaian Target Capaian Urusan Statistik

No	Indikator Capaian	2018
1	Tersedianya Data Statistik Umum, Dasar dan Sektoral skala Kabupaten	9

Sumber : OPD Kab Karanganyar Tahun 2019 (diolah Tim Penyusun)

24. Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Tahun 2018 menunjukkan dari 10 indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.45.
Pencapaian Target Capaian Urusan Komunikasi dan Infromatika

No	Indikator Capaian	2018
1	Ijin status LPPL	1
2	Jumlah menara yang legal	48
3	Jumlah provider telekomunikasi	9
4	Jumlah warnet / wartel yang dibina dan diberi pengawasan	147

No	Indikator Capaian	2018
5	Jumlah Perangkat siaran	32
6	Jumlah PPID yang dibina	84
7	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	10
8	Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	85
9	Frekuensi kegiatan talkshow di Televisi	18
10	Frekuensi kegiatan dialog interaktif di radio bersama Bupati / Muspida / Kepala SKPD / Ormas	69

Sumber : DISKOMINFO Kab Karanganyar Tahun 2019

25. Kearsipan dan Perpustakaan

Capaian indikator kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan Tahun 2018 ditunjukkan dengan 3 indikator berikut ini :

Tabel II.46.
Pencapaian Target Capaian Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

No	Indikator Capaian	2018
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab.	70.403
2	Meningkatnya Jumlah Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar	871
3	Terselamatkannya dokumen/arsip daerah	7000

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karanganyar Tahun 2019

2.1.2. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Capaian indikator kinerja urusan pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ditunjukkan dengan 45 indikator. Sebanyak 13 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, 15 indikator memiliki capaian yang rendah, 2 indikator memiliki capaian yang sedang, 5 indikator memiliki capaian yang tinggi dan 11 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.47.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanian

No	Indikator Capaian	2018
1	Produksi Padi (Ton)	329.885
2	Produksi Jagung (Ton)	21,201
3	Produksi kedele (Ton)	1,397
4	Produksi Bawang Merah (Ton)	na
5	Produksi Bawang putih (Ton)	21,450
6	Produksi Ubi Jalar (Ton)	32,462
7	Produksi Ubi Kayu (Ton)	76,927
8	Produksi Kacang Tanah (Ton)	2,085
9	Produksi Melon (Ton)	na
10	Produksi Wortel (Ton)	na
11	Produksi Cabe (Ton)	23,000
12	Produksi Kentang (Ton)	na
13	Produksi Bunga Krisan (Tangkai)	na

No	Indikator Capaian	2018
14	Produksi Tebu (Ton)	5,059.04
15	Produksi Kelapa (Ton)	927.264
16	Produksi Kakao (Ton)	21.44
17	Cengkeh (Ton)	188.46
18	Karet (liter)	na
19	Tembakau (Ton)	526.02
20	Jumlah pelaku agribisnis yang mendapat pelatihan	1120
21	Jumlah pemberdayaan kelompok tani	452
22	Jumlah Gapoktan penerima dan PUAP	174
23	jumlah desa dengan peluang pengembangan usaha pertanian komoditas unggulan	147
24	Rasio ketersediaan bibit unggul dengan tingkat produksi	0,43
25	Persentase produksi tanaman dengan sarana produksi yang tersedia	53
26	Persentase tingkat produksi tanaman perkebunan	63
27	Jumlah pusat-pusat etalase eksebisi promosi dengan pemasaran hasil - hasil pertanian/ perkebunan	3
28	Jumlah promosi/ pameran yang diikuti dengan jumlah produk unggulan daerah	6
29	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan	1
30	Jumlah Kebun Percontohan Penerapan Teknologi Baru	28
31	Jumlah Demplot Tanaman Percontohan Penerapan Teknologi Baru	28
32	Peningkatan derajat kesehatan hewan	107
33	Tersedianya sarpras kesehatan hewan	30
34	Terwujudnya asal produk hewan yang higins, ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal)	103
35	Peningkatan Sarpras kesmavet dan kesrawan	5
36	Peningkatan produksi daging	35186812
37	Peningkatan produksi susu	1450624
38	Peningkatan produksi telur	111099371
39	Terciptanya wirausaha mandiri peternakan	317
40	Peningkatan SDM petani ternak	79
41	Terlaksananya promosi hasil ternak	13
42	Terlaksananya lomba kelompok tani ternak	5
43	Terlaksananya pengawasan inventarisasi usaha peternakan dan poultry shop	5
44	Terbangunnya demplot biogas	2
45	Meningkatnya mutu genetik ternak dengan tersedianya :	
	- Straw	71.843
	- N2 Cair	39.450

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Karanganyar Tahun 2019

2. Kehutanan

Capaian indikator kinerja urusan kehutanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 15 indikator Sebanyak 1 indikator memiliki capaian yang sangat rtinggi, dan 14 indikator tidak bisa di hitung karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel II.48.
Pencapaian Target Capaian Urusan kehutanan

No	Indikator Capaian	2018
1	Persentase produski hasil hutan non kayu dengan luas areal di bawah tegakan	0
	Jumlah hasil hutan yang dapat di kelola	0
2	Persentase Penebangan kayu sesuai standard dan ijin yang berlaku dengan jumlah luas areal hutan	0
3	Jumlah Pembudidayaan tanaman kehutanan	0
4	Presentase penataan hasil hutan dengan pelaksanaan reboisasi	0
5	Presentase jasa lingkungan hutan dengan sumber daya hutan	0
6	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	39,63
7	Jumlah hasil hutan yang dapat di kelola sebagai sumber pendapatan	0
8	Persentase penghijauan hutan dengan ketersediaan bibit	0
9	Jumlah bibit / benih tanaman kehutanan yang tersedia	0
10	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	0
11	Jumlah sarana pengamanan hutan	0
12	Jumlah usaha perhutanan rakyat yang dapat dikembangkan	0
13	Jumlah kebakaran hutan yang dapat dikendalikan	0
14	Presentase jumlah hama penyakit yang dapat dikendalikan dengan tingkat produksi tanaman kehutanan	0
15	Jumlah luas lahan kehutanan yang dapat diinventarisir (Ha)	0

Sumber : Evaluasi RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2013 – 2018 (diolah Tim Penyusun)

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian indikator kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral Tahun 2017 ditunjukkan dengan 3 indikator.

Tabel II.49.
Pencapaian Target Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Indikator Capaian	2018
1	Pendistribusian LPG 3 Kg lancar	96
2	Administrasi Pelanggan LPG	1731
3	Terlaksananya sosialisasi dengan baik	4946

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab Karanganyar Tahun 2019

4. Pariwisata

Capaian indikator kinerja urusan pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ditunjukkan dengan 53 indikator. Sebanyak 36 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, 2 indikator memiliki capaian yang tinggi, 1 indikator memiliki capaian yang sedang dan 14 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.50.
Pencapaian Target Capaian Urusan Pariwisata

No	Indikator Capaian	2018
1	jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata	5,183.822
2	meningkatanya promosi wisata melalui media elektronik	5,183.822
3	meningkatnya kerjasama promosi pariwisata	5,183.822

No	Indikator Capaian	2018
4	meningkatnya kerjasama promosi travel dialog	5,183.822
5	meningkatnya jaringan promosi wisata	5,183.822
6	meningkatnya pemandu wisata/ guide yang handal	80
7	sarana prasarana fotografi, alat presentasi, komputer, alat-alat pameran dll	9
8	jumlah promosi brosur, leaflet CD obyek, kalender event dll	3.675
9	jumlah buku profil kepariwisataan	0
10	terpilihnya duta wisata	10
11	jumlah data statistik kepariwisataan	0
12	Peningkatan SDM masyarakat di bidang pariwisata dan bekerjasama dengan lembaga lainnya	2
13	meningkatnya kesadaran wisata masyarakat	16
14	meningkatnya kerjasama promosi wisata masyarakat	0
15	Sosialisasi tentang manajemen atrekhum	0
16	jumlah data pengusaha jasa atrekhum	0
17	rencana program pengusaha jasa atrekhum	0
18	pembinaan dan pelatihan Saka Pariwisata	50
19	Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan	65
20	Peningkatan dan penambahan obyek wisata	0
21	pembangunan Diorama Temuan Fosil	0
22	Pembangunan Gardu pandang dan Gasebo candi ceto	0
23	Pembangunan gardu pandang candi sukuh	0
24	Pengembangan Wahana Rekreasi jumog	0
25	Pengembangan Wahana Rekreasi parangijo	0
26	Pembangunan Rest Area area tawangmangu	0
27	peningkatan sarana prasarana obyek wisata	9
28	Tersedianya lahan pengembangan Obyek Wisata Sapta Tirta	0
29	Tersedianya papan informasi lokasi wisata	0
30	Petunjuk pada obyek wisata Pembuatan baliho	20
31	Pelebaran jalan pos retribusi kawasan obyek wisata	0
32	Pembuatan pos retribusi Gondosuli	0
33	Pembelian tanah untuk pos retribusi Gondosuli	0
34	Pembelian tanah utk pembangunan kampung purba	0
35	Data usaha sarana pariwisata	0
36	DED (detail engenering design)	1
37	Sosialisasi tentang bidang kepariwisataan	50
38	Pembinaan pengusaha pariwisata	100
39	Pembinaan pengusaha rumah makan	50
40	Pembinaan pengusaha Hotel	500
41	Pelatihan manajemen Desa Wisata	0
42	Terlaksananya festival potensi daerah	0
43	Munculnya perjanjian kerjasama bidang pariwisata baru	5
44	Kerjasama dengan pihak lain	0
45	Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi	0
46	Meningkatnya daya tarik wisata	59
47	Pemberdayaan pengrajin	0
48	Pengembangan agrowisata	8
49	Keunikan lokal	4
50	Outbound	0

No	Indikator Capaian	2018
51	Penelitian dan survey	0
52	obyek wisata	0
53	jumlah baliho yang terawat dan terpelihara	0

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Karanganyar Tahun 2019

5. Perikanan dan Kelautan

Capaian indikator kinerja urusan perikanan dan kelautan Tahun 2018 ditunjukkan dengan 14 indikator. Sebanyak 3 indikator memiliki capaian yang rendah, 7 indikator memiliki capaian tinggi dan 4 indikator memiliki capaian sangat tinggi.

Tabel II.51.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Indikator Capaian	2018
1	Terciptanya wirausaha mandiri perikanan budidaya	304
2	Peningkatan produksi perikanan budidaya	8.046,501
3	Peningkatan areal budidaya perikanan	0.72
4	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan	27
5	Terciptanya wirausaha mandiri perikanan tangkap	15
6	Peningkatan produksi perikanan tangkap	2675086
7	Peningkatan pengeta-huan dan ketrampilan nelayan perairan umum	20
8	Penumbuhan kelembagaan	334
9	Kemadirian kelembagaan	17
10	Terciptanya wirausaha mandiri pengolahan dan pemasaran	22
11	Peningkatan kapasitas produksi pengolahan dan pemasaran ikan	22.5
12	Peningkatan tingkat konsusmsi ikan	77,55
13	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengolah dan pemasar iikan	22.5
14	Tersedianya data statistik perikanan yang cepat, akurat dan terkini.	4

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Karanganyar Tahun 2019

6. Perdagangan

Capaian indikator kinerja urusan perdagangan Tahun 2018 ditunjukkan dengan 26 indikator. Sebanyak 7 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, 1 indikator memiliki capaian tinggi dan 12 indikator memiliki capaian sangat tinggi. Sedangkan yang belum ada datanya ada 5 indikator.

Tabel II.52.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perdagangan

No	Indikator Capaian	2018
1	Tersedianya alat berat pengangkut sampah ke TPA	0
2	Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan	na
3	Terwujudnya seragam dan kelengkapan pengelola kebersihan pasar	83
4	Terwujudnya bak pengangkut sampah di setiap pasar	4
5	Tersedianya gerobak sampah disetiap pasar	60

No	Indikator Capaian	2018
6	Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur	150
7	Mewujudkan para pedagang tertib perizinan usaha	150
8	Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur	150
9	Mewujudkan barang konsumsi yang aman	7
10	Mewujudkan barang komsumsi yg aman	7
11	Meningkatakan SDM dan Managemen Pertokoan	na
12	Mewujudkan pasar global bagi UKM, UMKM di kab. Karanganyar	na
13	Terwujudnya sistim perdagangan yang baik sesuai ketentuan	3
14	Antisipasi gejolak harga pasar yang terjadi secara situsional	28
15	Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar	50
16	Pembangunan Pasar secara menyeluruh	2
17	Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar	1
18	Pemeliharaan pasar tawangmangu	1
19	Terpenuhinya site plan pasar	1
20	Tertibnya Administrasi pasar	100
21	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Pasar	250
22	Tersedianya sarana dan prasarana keamanan pasar	18
23	Terpenuhinya sarana perdagangan yang memadai	150
24	Terbinanya PKL dan asongan	1.000
25	Peningkatan modal usaha bagi PKL dan asongan	na
26	Terjalinnya kemitraan PKL dengan dunia usaha	na

Sumber : DISDAGNAKERKOP UKM Kab Karanganyar Tahun 2019

7. Perindustrian

Capaian indikator kinerja urusan perindustrian Tahun 2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 8 indikator. Sebanyak 7 indikator memiliki capaian yang sangat rendah dan 1 indikator memiliki capaian sedang.

Tabel II.53.
Pencapaian Target Capaian Urusan Perindustrian

No	Indikator Capaian	2018
1	Meningkatnya mutu dan desain produk	0
2	Meningkatnya SDM pelaku IKM	105
3	Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi	105
4	Meningkatnya SDM pelaku IKM Simplisia dan Biofarmaka	0
5	Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi	0
6	Meningkatnya IK Pupuk dan AMDK dalam penerapan SNI	0
7	Meningkatnya mutu dan sarana produksi	0
8	Meningkatnya informasi tentang sentra IK	9

Sumber : Dinas DPMPTSP kab Karanganyar Tahun 2019

8. Transmigrasi

Capaian indikator kinerja urusan transmigrasi Tahun 2018 ditunjukkan dengan 1 indikator yaitu Terlaksananya transmigrasi regional. Indikator tersebut memiliki capaian yang sangat rendah.

Tabel II.54.
Pencapaian Target Capaian Urusan Transmigrasi

No	Indikator Capaian	2018
1	Terlaksananya transmigrasi regional	17

Sumber : DISDAGNAKERKOP UKM Kab Karanganyar Tahun 2019

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi antara lain :

a) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah/daerah,
b) sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
c) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
d) ketersediaan energi listrik, air bersih, gas, dan bakar minyak yang terus meningkat dan perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
e) keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
f) infrastruktur Teknologi Informasi (TI) antara lain : masih terbatasnya kapasitas bandwith internet, kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center serta keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat terhadap TI serta kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.

Permasalahan Infrastruktur sosial pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan perlu ditingkatkan, baik kondisi

ruang kelas layak maupun sarana prasarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA, Bahasa dan komputer); belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi di Puskesmas dan Rumah Sakit; masih banyaknya sarana dan prasarana publik dan atau ruang yang tidak sesuai dengan standar pelayanan/peruntukan. Misalnya ruang kelas yang belum mencapai 100% standar nasional, atau perpustakaannya belum berstandar nasional serta belum semua Puskesmas mempunyai rawat inap.

2.2.2. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun capaian angka kedua indeks kemiskinan tersebut menunjukkan kondisi yang membaik, namun masih perlu terus dipacu sehingga rata-rata pengeluaran penduduk miskin akan semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin adalah :

a) masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan masih rendah. Di samping itu juga eterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan;
b) jumlah penduduk miskin di Karanganyar meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun persentase jumlahnya masih melebihi persentase nasional (10,01% dibanding 9,82%).

2.2.3. Pengangguran

Secara umum permasalahan pengangguran di Kabupaten Karanganyar adalah :

a) masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sector produksi. Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan merupakan sektor "penampung" peralihan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, disamping itu angkatan kerja baru lebih memilih

sektor tersebut dibandingkan Sektor Pertanian. Komposisi penurunan jumlah pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri, Perdagangan dan Konstruksi perlu diperhatikan utamanya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, mengingat pada sektor Sektor Industri, Perdagangan dan Konstruksi dominan diterapkan sistem kerja outsourcing dan informal;

b) permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Meskipun dalam setahun terakhir mengalami penurunan, namun demikian jumlah setengah penganggur di Karanganyar relatif besar;

c) masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar kerja berpotensi menambah jumlah pengangguran. Di sisi lain SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana yang belum memadai;

d) belum optimalnya perluasan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.2.4. Pendidikan

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah:

a) belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan Pendidikan;

b) di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti di kalangan siswa;

c) kondisi sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun sarana prasarana

pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan computer;

d) permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal. Muatan lokal penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan "identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.

2.2.5. Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Karanganyar adalah :

a) tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan oleh meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Sementara tingginya AKB disebabkan masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang;

b) masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang bisa terjadi pada semua kalangan umur baik balita, anak-anak, remaja, dewasa dan bahkan sampai pada lanjut usia, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Gizi buruk merupakan gangguan kesehatan karena kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan;

c) meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru, dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan PSN; Tingginya kasus HIV/AIDS dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit; sedangkan tingginya kasus penyakit tidak menular meliputi jantung, hipertensi, stroke dan diabetes mellitus disebabkan karena faktor genetik dan masih kurangnya kesadaran pola hidup sehat;

d) permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda. Masih terdapat kelompokkelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara umum;

e) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat;

f) sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan di Karanganyar jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;

g) terkait dengan layanan kesehatan publik, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya penerapan metode penyelesaian secara kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.

2.2.6. Koperasi dan UMKM

Berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil, sedikitnya jumlah koperasi aktif dan sehat hanya sejumlah 30%, dari total seluruh koperasi yang berbadan hukum.

2.2.7. Pariwisata

Permasalahan wisata seringkali merupakan permasalahan yang saling kait mengkait, kunjungan sedikit karena kurang daya tarik, obyeknya tidak menarik, karena tidak ada dana untuk membangunnya, tidak ada dana karena tidak ada pengunjung, yaitu :

a) kunjungan wisatawan di Kabupaten Karanganyar yang tidak berkembang atau meningkat dengan signifikan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya daya saing obyek wisata daerah, dan belum optimalnya pengembangan potensi wisata berbasis wilayah;

b) belum mantapnya keterkaitan antar destinasi wisata, masih rendahnya kualitas pelaku wisata, dukungan infrastruktur, dan belum optimalnya kerjasama para pemangku

kepentingan dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Karanganyar.

2.2.8. Iklim Investasi

Permasalahan terkait dengan iklim investasi di Kabupaten Karanganyar di antaranya adalah kurang optimalnya pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas pengurusan dokumen izin dan non izin yang selanjutnya diproses oleh Perangkat Daerah terkait.

Permasalahan terkait pelayanan perizinan tersebut antara lain ditunjukkan dengan masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian dan besaran biaya administrasi. Selain itu, kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha.

2.2.9. Pangan

Meskipun demikian secara umum Kabupaten Karanganyar belum mampu mewujudkan sebagai kabupaten yang berdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumberdaya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil, dan rakyat miskin rawan pangan.

2.2.10. Keadilan Gender

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender adalah :

a) masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Dalam tataran publik berbagai permasalahan terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan;

b) Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

2.2.11. Seni Budaya

Permasalahan terkait dengan seni budaya adalah: kecenderungan semakin memudarnya nilai budaya sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian. Selain itu masih rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs, bangunan, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi.

2.2.12. Reformasi Birokrasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Secara lebih rinci permasalahan tersebut adalah struktur kelembagaan "maksimal/gemuk", etos kerja yang tidak merata tidak semua pegawai mempunyai etos kerja tinggi, pengembangan karier aparatur, belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur. Paradigma birokrasi yang belum dikembangkan secara optimal adalah transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat.

2.2.13. Aset Daerah

Pemerintah Daerah perlu memiliki barang dan kekayaan sebagai asset daerah. Selanjutnya aset daerah tersebut perlu dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karanganyar terkait dengan aset daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu masih belum optimalnya pengelolaan asset daerah. Berbagai upaya untuk memanfaatkan asset daerah dengan baik, telah dilakukan, namun hasilnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Masalah lain adalah aset daerah yang seringkali mengganggu pencapaian pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.14. Politik

Perkembangan pembangunan politik sudah dapat dikatakan ke arah lebih baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pilkada baik Gubernur maupun Bupati yang berjalan lancar dan aman, serta peran masyarakat dalam memilih yang meningkat. Meskipun demikian dirasakan masih rendah kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga peran serta masyarakat dalam Pemilu masih belum optimal.

2.2.15. Kemananan dan etertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban telah menjadi semangat masyarakat Karanganyar untuk menjaga dan mewujudkannya, melalui semboyan Karanganyar TENTERAM : Tenang Teduh Rapi dan Aman. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Karanganyar cukup baik dan mapan, sehingga kondisinya sangat kondusif. Meskipun demikian, harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnya radikalisme, dan kerusuhan masa karena kondisi masyarakat saat ini yang mudah terbawa emosi, terprovokasi karena masalah ekonomi, agama, rasa atau golongan. Permasalahan yang dijumpai yaitu terbatasnya jumlah

personil aparat keamanan dan ketertiban baik kepolisian dan TNI, Satpol PP, maupun Linmas. Disamping itu perlu juga terus ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan karena ada kecenderungan para kriminal dalam melakukan kejahatan disertai kekerasan secara nekat pada siang hari.

2.2.16. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Karanganyar saat ini adalah masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi hutan, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan; berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan.

2.2.17. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Karanganyar mempunyai wilayah yang tergolong rawan bencana, karenanya diperlukan kesiapsiagaan dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana guna mengurangi risiko bencana. Permasalahan yang dihadapi Karanganyar terkait dengan penanggulangan bencana adalah masih sedikitnya jumlah dan belum optimalnya SDM dan relawan terlatih serta terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.

2.2.18. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial maupun kebijakan daerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar termasuk dalam: masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas. Dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial maka penting keberadaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

a) Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;

b) Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun lintas provinsi yang berdapak pada sulitnya pendataan PMKS jalanan;

c) Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;

d) Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung penyelengaraan usaha kesejahteraan sosial yg berkualitas bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

e) Penguatan kapasitas potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang PMKS;

f) Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan PMKS khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh dunia usaha.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2019 dan perkiraan Tahun 2020, yang mencakup antara lain indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 tumbuh sebesar 5,27% (lima koma dua puluh tujuh persen) dan pada Triwulan III Tahun 2018 adalah 5,25% (lima koma dua puluh lima persen). Kondisi ini turun 0,02% 9nol koma nol dua persen). Sementara itu, Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013–2017 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada periode Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 726.655.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam trilyun, enam ratus lima puluh lima milyar rupiah) pada Tahun 2013 menjadi Rp. 894.050.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat trilyun lima puluh milyar rupiah) pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 167.395.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh trilyun tiga ratus sembilan puluh lima milyar rupiah). Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), periode Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 830.016.000.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh

trilyun enam belas milyar rupiah) menjadi Rp. 1.187.048.000.000.000,00 (seribu seratus delapan puluh tujuh trilyun empat puluh delapan milyar rupiah), atau meningkat sebesar Rp. 357.032.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh trilyun tiga puluh dua milyar rupiah).

Perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu Tahun 2013–2017, menunjukkan pertumbuhan nilai sektor yang stabil dengan makin tingginya peran sektor industri pengolahan dan jasa diikuti dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nilai sektor industri pengolahan ADHK pada Tahun 2013 mencapai nilai Rp. 254.694.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat trilyun enam ratus sembilan puluh empat milyar rupiah) meningkat menjadi Rp. 308.820.000.000.000,00 (tiga ratus delapan trilyun delapan ratus dua puluh milyar rupiah) pada Tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB mencapai Rp. 292.260.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua trilyun dua ratus enam puluh milyar rupiah) pada Tahun 2013 menjadi Rp. 414.988.000.000.000,00 (empat ratus empat belas trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan milyar rupiah) pada Tahun 2017. Sementara itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan peran dalam pertumbuhan PDRB mengalami penurunan. Namun demikian nilai PDRB sektor pertanian masih mampu tumbuh sebesar Rp. 108.830.000.000.000,00 (seratus delapan trilyun delapan ratus tiga puluh milyar rupiah) pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 118.125.000.000.000,00 (seratus delapan belas trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) di Tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB dari Rp. 131.450.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu trilyun empat ratus lima puluh milyar rupiah) di Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 167.246.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh trilyun dua ratus empat puluh enam milyar rupiah) Tahun 2017 dan diimbangi terjaganya kesejahteraan petani yang ditunjukan angka NTP selalu dijaga diatas 100.

Demikian pula nilai sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepada motor yang mendasarkan ADHK mencapai Rp. 105.825.000.000.000,00 (seratus lima trilyun delapan ratus dua puluh lima milyar rupiah) di Tahun 2013 kemudian meningkat menjadi Rp. 129.342.000.000.000,00 (serratus dua puluh sembilan tiga ratus empat puluh dua milyar rupiah) di periode Tahun 2017. Apabila ditarik data keseluruhan, stabilitas juga diperlihatkan oleh seluruh lapangan usaha yang ada di dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2013-2017 mampu tumbuh stabil. PDRB Jawa Tengah apabila dilihat dari sisi pengeluaran selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa peran konsumsi rumah tangga mampu dijaga pada kisaran 62,70 (enam puluh dua koma tujuh puluh) pada Tahun 2013 dan 60,71 (enam puluh koma tujuh puluh satu) pada Tahun 2017. Peran investasi yang ditunjukkan oleh konsumsi sektor swasta dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga terus mengalami perbaikan selama 5 (lima) tahun yaitu dari 29,18 (dua puluh sembilan koma delapan belas) pada Tahun 2013 menjadi 30,90 (tiga puluh koma sembilan puluh) pada Tahun 2017. Namun demikian, ekspor impor masih terus menjadi perhatian karena selalu mengalami defisit yaitu 358.580.000 US$ (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dollar Amerika) pada Tahun 2013 dan 701.730.000 US$ (tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dollar Amerika) pada Tahun 2017. Dengan melihat perkembangan ini maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sangat optimistik dapat terus tumbuh pada 5 (lima) tahun kedepan. Kondisi kinerja keuangan daerah Tahun 2014 - 2017, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara efektif pada Tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi

pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah. Prospek ekonomi Jawa Tengah 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan gambaran ekonomi selama kurun waktu Tahun 2013–2017, akan terus mengalami pertumbuhan yang optimistik. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan ekspor impor harus menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan pada infrastruktur yang mendorong produksi dan produktifitas dalam semua sektor yang berbasis sumber daya lokal. Demikian halnya dengan sumber–sumber pendapatan daerah akan terus dapat ditingkatkan meskipun peningkatannya akan mengalami tantangan terhadap tingginya permintaan untuk belanja pembangunan. Hal tersebut menuntut pemerintahan daerah untuk memulai inovasi pembiayaan pembangunan dengan mendorong peran masyarakat dan swasta melalui mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA), dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), melakukan pinjaman daerah dan penerbitan surat berharga (obligasi daerah). Belanja pemerintah terus didorong untuk peningkatan iklim usaha dan kewirausahaan yang ditopang oleh kebijakan akses permodalan dari lembaga keuangan dengan skema bunga murah.

Tabel III.1.
Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB/Kapita (juta rp)	26,41	na	28	28,5	29
2.	Inflasi (%)	3,71	2,68	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,54	5,3-5,7	5,4-5,8	5,7-6,1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,57	4,23	4,43	4,33	4,23
5.	Angka Kemiskinan (%)	13,01	11,32	10,57	9,81	9,05
6.	Indeks Gini	0,36	0,37	0,35	0,34	0,33
7.	IPM	70,52	71,59	71,60	72,0	72,5
8.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	na	na	92,23	92,25	92,27
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,33	66,51	66,69	66,87	67,02

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023 Prov. Jateng, 2018, hal IX-1.

3.1.2. Kerangka Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi dan Pendapatan per kapita. Sebagai salah satu indikator PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun).

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh empat trilyun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 25.150.277.730.000,00. (dua puluh lima trilyun, serratus lima puluh milyar, dua ratus tujuh puluh tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Gambaran nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	24.635.058,52	10,87	20.262.444,41	5,22
2015	26.904.049,89	9,21	21.286.287,15	5,05
2016	29.322.302,42	8,99	22.428.803,81	5,37
2017	31.780.396,96	8,38	23.665.952,05	5,52
2018	34.287.872,56	8,72	25.150.277,73	5,98

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4.

Tabel III.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,10	4.293.074,91	4.612.407,76
B	Pertambangan dan Penggalian	292.753,83	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56
C	Industri Pengolahan	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35.770,42	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.823,63	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90
F	Konstruksi	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.743.954,18	2.985.502,98	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67
H	Transportasi dan Pergudangan	622.539,67	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	797.260,18	880.122,00	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31
J	Informasi dan Komunikasi	271.522,40	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76
L	Real Estat	424.736,83	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77
M,N	Jasa Perusahaan	77.648,25	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	529.338,06	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30
P	Jasa Pendidikan	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.681,35	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07
R,S, T,U	Jasa Lainnya	352.026,23	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05
PDRB ADHB		24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,42	31.780.396,96	

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Tabel III.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.787,36
B	Pertambangan dan Penggalian	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13
C	Industri Pengolahan	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68
F	Konstruksi	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,49	1.705.066,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
	Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.158,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	662.676,82	697.279,26	3.024.862,36	771.278,70	828.69517
J	Informasi dan Komunikasi	294.101,84	315.512,46	245.350,03	365.995,96	427.715,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	661.493,15	705.929,31	10.197.089,35	819.720,53	888.659,50
L	Real Estat	382.272,84	403.183,16	39.238,59	451.138,07	476.205,55
M,N	Jasa Perusahaan	65.212,06	70.905,07	17.583,77	84.954,29	93.988,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.438,92	441.204,73	1.427.437,70	459.929,74	469.542,27
P	Jasa Pendidikan	688.055,98	803.580,33	2.691.372,68	908.533,43	973.744,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	164.531,82	637.927,05	189.245,46	205.912,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	277.098,01	314.442,75	331.233,99	350.478,69	384.464,47
PDRB ADHK		19.256.516,26	21.286.287,15	22.428.803,81	23.665.952,05	

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 45,68% (empat puluh lima koma enam puluh delapan persen), Pertanian menyumbang sekitar 13,45% (tiga belas koma empat puluh lima persen) dan Pariwisata, perdagangan dan jasa menyumbang sekitar 11,15% (sebelas koma lima belas persen)). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,45	14,89	14,31	14,31	13,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,26	1,24	1,24	1,22
3.	Industri Pengolahan	45,64	45,21	45,78	45,78	45,68
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
5.	Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,7	0,06
6.	Konstruksi	6,34	6,37	6,39	6,39	6,97
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,10	11,06	11,20	11,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,55	2,48	2.60	2,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,27	3,33	3,33	3,19
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,06	1,05	1,09	1,18
11.	Jasa Keuangan	3,37	3,41	3,47	3,62	3,75
12.	Real Estate	1,72	1,74	1,71	1,71	1,71
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,36	0,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	2,10	2.08	2.02	1,93
15.	Jasa Pendidikan	4,32	4,27	4,30	4,39	4,46
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,82	0,82	0,83	0,83

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
17.	Jasa lainnya	1,43	1,41	1,42	1,41	1,45
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta (Subosukawonosraten) tahun 2018 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Karanganyar yang mencapai 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen). Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Wonogiri yang hanya mencapai 5,41% (lima koma empat puluh satu persen).

Tabel III.6.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten
Tahun 2014-2018

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Wonogiri	5,30	5,34	5,23	5,17	5,41
2	Klaten	5,79	5,64	5,14	5,07	5,57
3	Sukoharjo	5,40	5,69	5,71	5,72	5,82
4	Surakarta	5,28	5,44	5,32	5,33	5,57
5	Boyolali	5,42	6,08	5,30	5,52	5,72
6	Sragen	5,58	6,05	5,74	5,81	5,75
7	Karanganyar	5,22	5,05	5,37	5,52	5,98

Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2019

b. Inflasi

Selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2013 hingga Tahun 2017) menunjukan kondisi yang positif, yaitu pada Tahun 2013 sebesar 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen) atau mengalami penurunan, namun realisasi Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 sebesar 1,93% (satu koma sembilan puluh tiga persen), Inflasi Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan (naik sebesar 1,22 (satu koma dua puluh dua) poin). Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan inflasi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar yang mengakibatkan daya beli penduduk miskin semakin melemah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

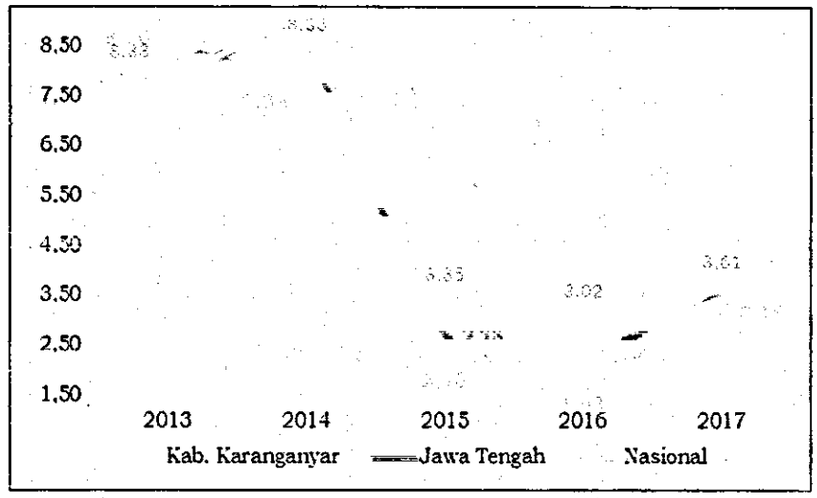

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 3.1

Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibanding kan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2017 (%)

c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Karang anyar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkaan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 39.004.360,00 (tiga puluh sembilan juta empat ribu tiga ratis enam puluh rupiah) atau naik sebesar 63,99% (enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2000 yang juga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar PDRB per kapita ADHB. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan kinerja yang positif/naik per tahunnya, yaitu pada Tahun 2013 sebesar Rp. 26.445.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat pulih lima ribu rupiah) dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 36.463.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar (semakin sejahtera). Gambaran perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), selengkapnya pada gambar 3.2.

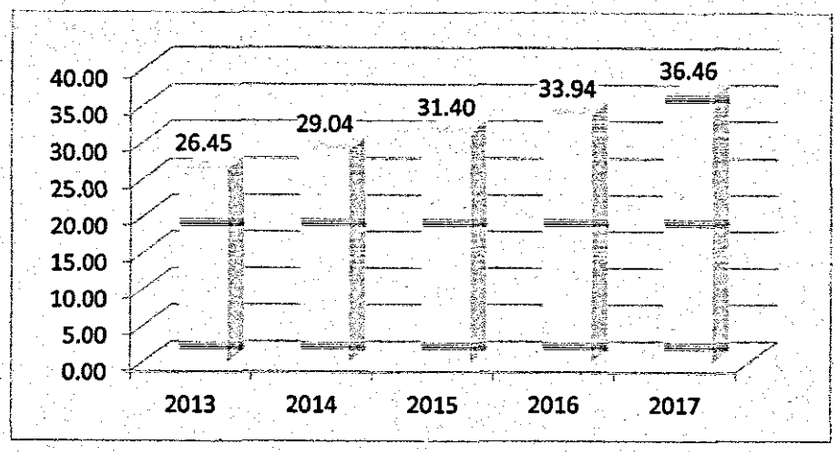

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Gambar 3.2

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) (Juta/tahun)

Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebesar Rp. 36.460.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya menempati posisi tertinggi.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Isu strategis pembangunan Karanganyar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2017 (posisi maret) terus mengalami penurunan, yaitu pada Tahun 2011 sebanyak 124.493 jiwa atau sebesar 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) turun menjadi 106.780 jiwa atau sebesar 10,01% (sepuluh koma nol satu persen) pada Tahun 2018. Posisi ini berada diatas persentase nasional tetapi dibawah persentase penduduk miskin di Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

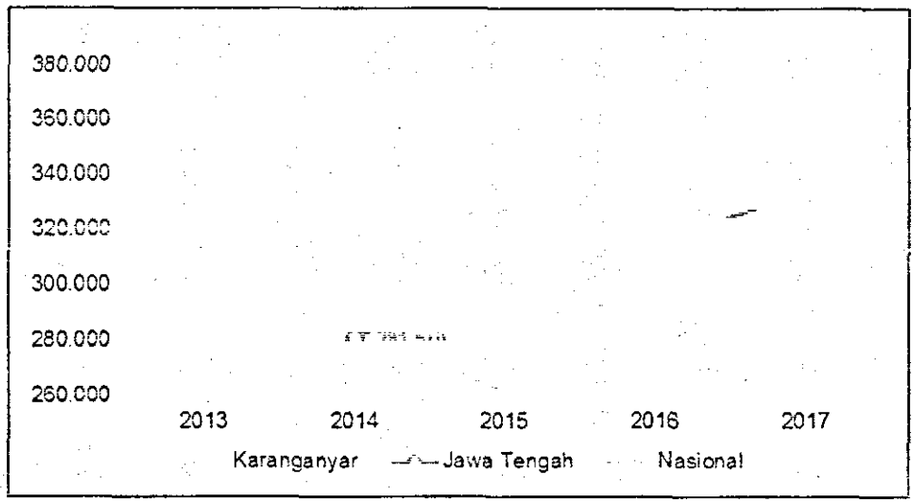

Sumber : SPKD Kab. Karanganyar, Baperlitbang 2018

Gambar 3.3

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami kenaikan per tahun, yaitu pada Tahun 2013 sebesar Rp. 275.865,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)/kapita/bulan hingga pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 340.538,00 (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)/kapita/bulan. Selain itu, Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun tersebut berada di atas capaian Garis Kemiskinan Jawa Tengah. Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya capaian Garis Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional.

b. Daya Saing Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar terjadi fluktuasi, yaitu pada dari Tahun 2011 sampai Tahun 2012 mengalami kenaikan dari 4,95% (empat koma sembilan puluh lima persen) menjadi 5,90% (lima koma sembilan puluh persen), namun pada Tahun 2012 hingga Tahun 2017 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 5,52% (lima koma lima puluh dua persen) dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).
- PDRB Per Kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan perkembangan PDRB Per kapita ADHB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, masih relevan atau sama-sama terus mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada

Tahun 2017 sebesar Rp. 340.538,00 (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)/bulan berada di atas Jawa Tengah sebesar Rp. 333.224,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)/bulan dan dibawah capaian Nasional sebesar Rp. 387.160,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah)/bulan.

- Inflasi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Inflasi Kabupaten Karanganyar pernah mengalami peningkatan pada Tahun 2013 mencapai 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) dan Tahun 2015 kembali naik menjadi sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam persen), dan turun di Tahun 2017 sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen), masih dibawah capaian inflasi Jawa Tengah 3,71% (tiga koma tujuh puluh satu persen) dan Nasional 3,61% (tiga koma enam puluh satu persen), sedangkan dibandingkan dengan capaian kabupaten lain disekitarnya berada di posisi tertinggi.

c. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

- Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada Tahun 2011 sebesar 71,00 (tujuh puluh satu) meningkat menjadi 75,22 (tujuh puluh lima koma dua puluh dua) pada Tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70 (tujuh puluh). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,52 (tujuh puluh koma lima puluh dua) dan Nasional sebesar 70,81 (tujuh puluh koma delapan puluh satu).
- Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2011 hingga Tahun 2015 terus mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun 2011 sebesar 72,91 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh satu) tahun dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 77,31 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu) tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,08 (tujuh puluh empat koma nol delapan) tahun dan Nasional 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam).

- Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA pada penduduk usia produktif, serta kecenderungan meningkatnya usia lanjut (non produktif). Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat.

d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   - Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pegunungan (daerah resapan, ruang terbuka hijau, alih guna lahan, kebakaran dan banjir dll) menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

e. Tata kelola pemerintahan
   - Dalam pengelolaan pemerintahan memerlukan adanya peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka *good governance* dan *clean goverment,* peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah.

f. Kedaulatan Pangan dan Energi
   - Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan

mentah maupun olahan. Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah.

g. Kesenjangan Wilayah

- Wilayah Kabupaten Karanganyar saat ini perkembangannya belum merata, daerah di bagian selatan, utara dan timur relatif kalah maju dibanding wilayah barat dan Pusat Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

Secara ringkas target capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Karanganyar dalam bentuk tabel berikut :

Tabel III.7.
Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2020
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	37.060.633.300.000
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	27.818.087,29 (juta Rp.)
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5,31-5,69 %
4.	Kemiskinan	11,55-12,28 %
5.	IPM	75,95-76,47
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,00-3,10
7.	Inflasi	4,15+1%
8.	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. 37.675
9.	Angka Harapan Hidup	76,35 tahun

Sumber : Baperlitbang, 2019 (diolah)

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dijelaskan oleh kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.8.
Pendapatan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2020-2021

KODE REK	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	2.107.878.826.000	2.123.842.477.000	2.225.308.095.000	2.427.409.515.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	327.100.643.000	327.921.842.000	357.146.402.000	441.556.988.000
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	151.029.000.000	144.550.000.000	169.700.000.000	194.986.305.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.585.541.000	14.684.582.000	12.837.216.000	19.602.998.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.133.626.000	14.956.651.000	13.184.344.000	18.715.894.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.352.476.000	153.730.609.000	161.424.842.000	208.251.791.000
4 .2.	DANA PERIMBANGAN	1.355.473.462.000	1.397.422.275.000	1.398.560.239.000	1.559.834.171.000
4. 2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	44.530.493.000	38.857.259.000	35.417.454.000	42.253.817.000
4.2 .2	Dana Alokasi Umum	978.664.650.000	1.013.422.549.000	1.027.021.995.000	1.132.926.665.000
4.2. 3	Dana Alokasi Khusus	332.278.319.000	345.142.467.000	336120.790.000	384.653.689.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	425.304.721.000	398.498.360.000	469.601.454.000	426.018.356.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	76.734.900.000	76.734.900.000	92.347.200.000	89.901.852.000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.533.194.000	130.533.194.000	132.533.194.000	137.802.681.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.089.437.000	191.230.266.000	244.721.060.000	198.313.823.000
4. 3 .5	Bantuan Keuangan dr.Prov/Pemda Lainnya	10.947.190.000	-	-	-
4. 3 .6	Pendapatan Lainnya				

Sumber : BKD, 2019

3.2.2. Belanja Daerah

Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan belanja yang tepat. Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

1) belanja daerah dilakukan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
2) belanja daerah untuk memenuhi pelaksanakan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3) belanja daerah untuk mengakomodir program pemba ngunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
4) penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah, memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi

belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;

5) belanja daerah yang alokasikan kepada Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
6) belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga Prioritas Belanja Daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan / dianggarkan untuk mencapai hal tersebut.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial). Untuk menjalankan urusan wajib maupun urusan pilihan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar merumuskan program-program maupun kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020.

Tabel III.9.
Belanja Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Belanja Tahun 2020-2021

No	Uraian	TAHUN (Rp.000)			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.279.841.882.000	2.313.588.178.000	2.287.236.745.000	2.577.551.736.000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.428.577.435.000	1.426.431.128.000	1.462.515.585.940	1.554.482.920.000
2.1.1	Belanja Pegawai	991.088.189.000	1.015.579.441.000	1.029.051.870.000	1.054.583.340.000
2.1.4	Belanja Hibah	95.504.356.000	57.134.000.000	61.302.119.340	82.370.421.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.825.000.000	13.295.000.000	16.842.000.000	23.170.237.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.419.192.000	15.923.459.000	18.253.721.600	31.819.551.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	317.240.698.000	321.999.228.000	329.565.875.000	360.039.371.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	851.264.447.000	887.157.050.000	824.721.159.060	1.023.068.816.000
2.2.1	Belanja Pegawai	32.171.292.100	7.042.743.000	8.666.880.000	10.530.864.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.283.534.979	542.157.138.000	604.252.275.879	540.957.645.000
2.2.3	Belanja Modal	303.809.619.921	337.957.169.000	211.802.003.181	471.580.307.000

Sumber : BKD, 2019

Urusan pemerintahan secara garis besar dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan refleksi dari anggaran berbasis kinerja yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah. Belanja langsung Perangkat Daerah, harus dipertanggungjawabkan hasilnya oleh Perangkat Daerah tersebut. Belanja Tidak Langsung disediakan oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau Perangkat Daerah sendiri, sehingga keberhasilan program/kegiatan sangat bergantung pada kerjasama antara Perangkat Daerah dan Penerima bantuan atau hibah.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014-2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian *(prudential)* dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Berikut realisasi pembiayaan Tahun 2018-2019 dan perkiraan pembiayaan Tahun 2020-2021, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.10.
Pembiayaan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2021

No	Uraian	TAHUN (Rp.)			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	186.963.056.000	199.745.701.000	121.128.650.000	194.142.221.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.725.531.000	109.745.701.000	121.128.650.000	194.142.221.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	237.525.000	90.000.000.000		
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000	10.000.000.000	59.200.000.000	44.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	10.000.000.000	29.200.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah	-	-		4.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	171.963.056.000	189.745.701.000	61.928.650.000	150.142.221.000

Sumber : BKD, 2019

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2020 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023. Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar".

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

4.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

a. meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;
b. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
d. meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
e. memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1) perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
3) pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
4) pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) pengentasan kemiskinan;
6) pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

4.1.2. Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
b. mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju;
c. meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;

d. membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik;
e. mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan;
f. membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah :

1) perluasan infrastruktur dasar;
2) penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
3) peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
4) peningkatan infrastruktur perkotaan;
5) perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

4.1.3. Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
b. mempercepat transformasi struktural;
c. meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;
d. menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi;
e. membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah :

1) penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

2) peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
3) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4.1.4. Prioritas Nasional 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan energi;
b. meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
c. meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
d. meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;
e. mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah :

1) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
2) peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
3) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
4) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5) penguatan ketahanan bencana.

4.1.5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan posisi kekuatan pertahanan;
b. meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional;
c. menegakkan hukum dan anti korupsi;
d. membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penang gulangan terorisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

e. meningkatkan keamanan dunia maya (siber).

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah program prioritas :

1) penguatan kemampuan pertahanan;
2) peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional;
3) penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
4) penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
5) penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): *"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"*, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1) pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3% (lima koma tiga persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen). Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0% (dua persen) sampai dengan 4,0% (empat persen);
2) sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% (delapan koma lima persen) sampai dengan 9,0% (sembilan persen); IPM menjadi 72,5 (tujuh puluh dua koma lima); gini rasio pada kisaran 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) sampai dengan 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) dan tingkat pengangguran terbuka 4,8% (empat koma delapan persen) sampai dengan 5,1% (lima koma satu persen);
3) sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62% (empat koma enam puluh dua persen), Jawa-Bali 5,74% (lima koma tujuh puluh empat persen), Kalimantan 4,08% (empat koma nol delapan persen), Sulawesi 6,68% (enam koma enam puluh delapan persen), Nusa Tenggara 3,12% (tiga koma dua belas persen), Maluku 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen) dan Papua 7,18% (tujuh koma delapan belas persen).

4.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia" dengan prioritas :

4.2.1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pembangunan pada :

a. pengurangan kemiskinan;
   1) penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan;
   2) penguatan sustainable *livelihood;*
   3) penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
   4) penguatan sumber daya manusia pengelola Basis Data Terpadu (BDT) dalam verifikasi dan validasi;

b. menurunkan angka pengangguran :
   1) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
   2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi;
   3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja;

4.2.2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fokus pada :

a. perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui :
   1) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan;
   2) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
   3) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
   4) pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*;

5) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat;
6) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
7) peningkatan pendidikan keagamaan; dan
8) peningkatan kesejahteraan bagi guru pengajar keagamaan;

b. meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitative dalam pembangunan kesehatan, melalui :
1) peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanggulangan *stunting*, penuntasan ODF, peran Posyandu);
2) peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan;
3) peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan;
4) pembudayaan/pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

c. peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, melalui :
1) pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak;
2) peningkatan akses politik untuk perempuan; dan
3) pencegahan perdagangan manusia;

d. penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial antara lain melalui :
1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (*senecsent diseases*) dan *degeneratif*;
2) peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, prasarana dan sarana umum, bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial; dan
3) pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (*savings*) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari

tua;

e. keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan melalui penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan.

4.2.3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus pada :

a. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui :
   1) peningkatan kemampuan petani;
   2) penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/ asuransi petani;
   3) pengembangan pertanian terintegrasi;
   4) perbaikan prasarana sarana pertanian;
b. meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan, melalui :
   1) peningkatan kapasitas usaha perikanan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan;
   2) peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; serta
   3) perbaikan tata niaga perikanan;
c. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
d. pewujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan, melalui operasional sistem logistik daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan;
e. peningkatan produksi dan poduktivitas usaha dan industri kecil dan menengah, melalui :
   1) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja;

2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri;
3) pengembangan inovasi teknologi produksi;
4) penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk);
5) pengembangan bahan baku industri substitusi impor;
6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; serta integrasi antar sektor pendukung;

f. peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat *(local based community)* dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa ekowisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata;

g. perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif, melalui :
1) perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;
2) pengembangan digital *investment promotion*;
3) mendorong perwujudan investasi hijau; dan
4) peningkatan sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha;

h. peningkatan eksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang serta koneksivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah perdesaan, dan wilayah kemiskinan;

i. peningkatan kualitas lingkungan, melalui :
1) pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
2) konservasi lingkungan;
3) pemulihan kembali lingkungan;

j. peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, melalui :
1) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;

2) peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
3) pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT);
4) peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan;
5) penguatan ketahanan bencana.

4.2.4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduksivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiscal daerah, fokus pada :

a. peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat *(direct services)* serta membangun pemerintahan yang terbuka *(open government)* melalui kunjungan lapangan *(roadshow)* dalam rangka menuju nilai IKM 82;
b. peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
c. peningkatan manajemen pemerintahan yang besih dan akuntabel;
d. perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui manejemen pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel;
e. peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan;
f. peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal melalui pemberdayaan 300 Kader Siaga Trantibum (KST).

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2020 yaitu:

a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15% (lima belas persen);

b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80 (delapan puluh);
c. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,81% (sembilan koma delapan puluh satu persen);
d. Indeks Gini sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat);
e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33% (empat koma tiga puluh tiga persen);
f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4% (lima koma empat persen) sampai dengan 5,8% (lima koma delapan persen);
g. Inflasi pada angka 3,0+1;
h. PDRB per kapita sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
i. Indeks Williamson sebesar 0,59 (nol koma lima puluh sembilan);
j. Nilai Tukar Petani sebesar 102,42 (serratus dua koma empat puluh dua);
k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72 (tujuh puluh dua);
l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25 (sembilan puluh dua koma dua puluh lima); dan
m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,87 (enam puluh enam koma delapan puluh tujuh).

Rencana pembangunan daerah Tahun 2020 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu:

(1) sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
(2) peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
(3) reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
(4) satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
(5) obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelatihan *startup* untuk Wirausaha Muda;

(6) menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
(7) pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
(8) pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
(9) sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
(10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

4.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 memperhatikan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2020. Tahun 2020 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan tahun 2019 dengan fokus yaitu *"Pembangnan SDM Berkarakter Unggul, Inovatif, Maju dan Tangguh, serta Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur"*

Dalam rangka mewujudkan target kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah:

1. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas, dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan kualitas SDM pendidikan; (3) pengembangan system kebujakan penyelenggaraan penddikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (4) jaminan sosial bantuan pendidikan.
2. Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan rasio SDM kesehatan; (3) pengembangan system kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan (4) jaminan bantuan sosial kesehatan.

Dengan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2020 yaitu :

4.3.1. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul, melalui :

a. penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas;
b. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Pendidikan;
c. penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
d. penyediaan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
e. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;
f. penyediaan bantuan kesehatan untuk semua *(universal health converage)*.

4.3.2. Pengembangan Inovasi dan Prestasi daerah, melalui :

a. pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;
b. pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.

4.3.3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, melalui :

a. pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
b. pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
c. penguatan koordinasi dan sinergitas antar opd dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu :
    1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik;
    2) infrastruktur pendidikan;
    3) infrastruktur kesehatan;
    4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, dan fasilitas

keagamaan);

5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.

4.3.4. pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak, melalui :

a. penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;
b. pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;
c. pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020, DPRD menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari lembaga eksekutif, yaitu :

1. pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. perbanyak juga peningkatan status jalan antar desa menjadi jalan kabupaten dan perhatian infrastruktur di kawasan wisata untuk keselamatan wisatawan dan masyarakat. yang paling penting adalah, diimbangi dengan upaya pemeliharaan secara rutin serta berkala, sehingga masyarakat aman dan nyaman dalam beraktifitas.
2. pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar bagian barat yaitu Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo, segera dilaksanakan dan upayakan segera bisa bersaing keindahannya dengan kota Solo dan Solo Baru. ruas jalan dari dan menuju pintu tol di Klodran, Colomadu dan Gondangrejo, ruas jalan Solo-Purwodadi yang sekarang sangat ramai, agar selalu diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk diperlebar menjadi 2 (dua) jalur, sehingga lalu lintas dapat lancar.
3. penyediaan lapangan pekerjaan di sector-sektor yang berkaitan dengan jasa, peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.
4. buatkan program untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi distribusi pendapatan, meningkatkan cakupan

pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman.

5. peningkatan peran balai latihan kerja (BLK) dan permodalan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam berwirausaha.
6. pengembangan potensi desa/daerah di bidang pariwisata untuk kesejahteraan rakyat, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan prioritas pertanian, perikanan dan peternakan menuju agropolitan.
7. mendorong terciptanya *one village one product* (satu desa satu produk), untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa.
8. pemerintah kabupaten karanganyar harus merespon cepat program provinsi jawa tengah dalam menciptakan 1000 (seribu) desa wisata. mohon untuk didorong, dikoordinir dan difasilitasi desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata tersebut.
9. buatlah program pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, taman kota, permukiman kumuh melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan pasar desa dan kelurahan. selanjutnya peningkatan trantibum dan toleransi masyarakat serta reformasi birokrasi.
10. pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan, pemantaban sarana prasarana wilayah, peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
11. upayakan pendidikan gratis sampai tingkat SMA, dengan cara Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat kewenangan pendidikan menengah, sekarang ada di Pemerintah Provinsi.
12. maksimalkan pemberdayaan perempuan agar para ibu – ibu dapat lebih mandiri serta mendapatkan posisi dan peran yang layak. karena dengan cara ini, salah satu upaya untuk dapat

menekan angka perceraian yang masih tergolong tinggi di Kabupaten Karanganyar.

13. penyelesaian keikutsertaan masyarakat miskin dalam progam BPJS JKN, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.
14. peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat yang cepat, tepat dan murah. upayakan pelayanan KTP dan KK didelegasikan kepada Desa/Kelurahan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih optimal dalam memberikan pelayanan selain KTP dan KK.
15. peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara dan evaluasi kinerja baik PNS maupun Non PNS di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, dan BUMD untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan visi misinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
16. buatlah program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas keagamaan, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat guyub rukun dan hidup tentram dengan sesame warga lainnya tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan.
17. buatlah program untuk memfasilitasi kreatifitas kegiatan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya jawa, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuhdalam kehidupan masyarakat untuk semua usia dari muda-mudi sampai usia lanjut, melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi kreatif, dan seni kebudayaan berbasis kampung/desa.

4.5. Sasaran Makro Pembangunan Karanganyar Tahun 2020

Beberapa sasaran makro pembangunan Kabupaten Karanganyar yang direncanakan akan dicapai di Tahun 2020 adalah :

Tabel IV.1.
Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Target
1.	Rasio Konektivitas	30,00
	1. Penurunan Angka Kecelakaan	0,69
	2. Persentase Berkurangnya korban bencana alam	0,06
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,41
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,87
	2. Persentase kawasan kumuh	0,57
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,8
4.	Tingkat Inflasi	3,10
5.	PDRB Perkapita	28,556
	1. Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,51
	2. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	46,59
	3. Kontribusi PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum	4,75
	4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi / Investor Daerah	1,7
	5. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	11,45
	6. Skor Pola Pangan Harapan	88
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,86
	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,96
7.	Indeks Pembangunan Manusia	75,74
	1. Harapan Lama Sekolah	13,72
	2. Rata-rata Lama Sekolah	8,65
	3. Usia Haraan Hidup	77,57
9.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,643
	1. Indeks Ketahanan Sosial	0,647
	2. Indeks Ketahanan Ekonomi	0,597
	3. Indeks Ketahanan Lingkungan	0,687
10.	Nilai Kabupaten Peduli HAM	79,41
	1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	135
	2. Persentase tertanganinya kasus pelanggaran Perda	87
	3. Persentase Pengendalian kasus SARA (tidak ada kasus)	0
11.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78
	1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,1
	2. Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,30
13.	Prestasi Pemuda dan Olah Raga	20
	1. Jumlah Prestasi Pemuda di Regional /Nasional/Internasional	20
	2. Jumlah Prestasi Olahraga di Regional /Nasional/Internasional	20
14.	Angka Kemiskinan	7,58-8,58
	1. Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta)	12,46

No.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Target
	2. Persentase Penurunan PMKS	1,75
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,20
16.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,66
17.	Kabupaten Layak Anak	752
18.	Indeks Reformasi Birokrasi	65
	1. Indeks SPBE	2,37
	2. Nilai SAKIP	65
	3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
	4. Indeks Profisionalitas pegawai (IPP) ASN	80,67
	5. IKM Kabupaten	78,23
	6. Maturitas SPIP	3
	7. Indeks Arsip	79

Sumber : Baperlitbang, 2019

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut perlu diwujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Karanganyar serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hal-hal berikut :

a. sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan mendasarkan basis data terpadu utamanya di daerah kumuh perkotaan.
b. pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi dan rencana tata ruang dan wilayah, antara lain :
    1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    2) pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan Jenawi, Karangpandan, Ngargoyoso, dan Tawangmangu;
    3) kawasan industri Gondangrejo dan Kebakkramat;
    4) pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal;
    5) pengembangan kawasan strategis peruntukan wisata dan sosial budaya;
    6) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
c. pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah.
d. keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional dan provinsi di karanganyar.

e. bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa diprioritaskan pada :
   1) kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat/desa, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perkonomian dan mempercepat pencapaian program strategis kabupaten serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
   2) lokasi kegiatan diutamakan pada kawasan perbatasan lintas kecamatan, kawasan perbatasan lintas desa/kelurahan, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
f. peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan kabupaten/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.
g. pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.
h. peningkatan daya tarik obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
i. peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dengan tema : "Maju dan Tangguh" dengan Fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2020 yaitu "Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul, Inovatif, Maju, dan Tangguh, serta melanjutkan Pembangunan Infrastruktur".

5.1. Rencana Kerja Tahun 2020

Rencana kerja secara ringkas merupakan kumpulan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, dengan indikator dan target yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karanganyar diterjemahkan/dirinci menjadi dua urusan yaitu Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel V.1.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Program
Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
1.01.	Pendidikan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISDIKBUD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISDIKBUD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISDIKBUD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISDIKBUD
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIKBUD
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
7.	Program Pendidikan Non Formal	DISDIKBUD
8.	Program Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan	DISDIKBUD
9.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DISDIKBUD
1.02.	Kesehatan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINKES
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINKES
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINKES
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINKES
5.	Program Sumber Daya Kesehatan	DINKES
6.	Program Kesehatan Masyarakat	DINKES
7.	Program Pelayanan Kesehatan	DINKES
8.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DINKES
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	DPUPR
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPUPR
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DPUPR
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPUPR
5.	Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	DPUPR
6.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	DPUPR
7.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan penataan lingkungan	DPUPR
8.	Program tata ruang, jasa konstruksi, dan pengendalian mutu	DPUPR
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.	Program Pengembangan Perumahan	DISHUBPKP
2.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	DISHUBPKP
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SATPOL, KESBANGPOL, BPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SATPOL, KESBANGPOL, BPBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	SATPOL, KESBANGPOL, BPBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SATPOL, KESBANGPOL, BPBD
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SATPOL, KESBANGPOL, BPBD
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SATPOL
7.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SATPOL
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	SATPOL
9.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan	SATPOL

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
	bahaya kebakaran	
10.	Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa	KESBANGPOL
11.	Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat	KESBANGPOL
12.	Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL
13.	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD
1.06.	Sosial	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINSOS
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINSOS
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINSOS
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINSOS
5.	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	DINSOS
6.	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	DINSOS

5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tabel V.2.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Program dan Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
2.01.	Tenaga Kerja	
1.	Pogram Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DISDAGNAKER KOPUKM
2.	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	DISDAGNAKER KOPUKM
2.02.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DP3APPKB
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DP3APPKB
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DP3APPKB
4.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	DP3APPKB
5.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3APPKB
6.	Program Keluarga Sejahtera	DP3APPKB
2.03.	Pangan	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	DISPERTAN
2.04.	Pertanahan	
1.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SETDA
2.05.	Lingkungan Hidup	
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	DLH
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DLH
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DLH
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DLH
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH
6.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	DLH

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
7.	Program peningkatan pengendalian polusi	DLH
8.	Program penataan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan	DLH
9.	Program pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun	DLH
2.06.	Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISDUKCAPIL
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISDUKCAPIL
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISDUKCAPIL
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISDUKCAPIL
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPERMASDES
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISPERMASDES
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISPERMASDES
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISPERMASDES
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	DISPERMASDES
6.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	DISPERMASDES
7.	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	DISPERMASDES
8.	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	DISPERMASDES
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.	Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	DPP3APPKB
2.	Program Pengendalian Penduduk	DPP3APPKB
2.09.	Perhubungan	
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	DISHUBPKP
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DISHUBPKP
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DISHUBPKP
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISHUBPKP
5.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DISHUBPKP
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	DISHUBPKP
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUBPKP
8.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	DISHUBPKP
9.	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas	DISHUBPKP
2.10.	Komunikasi dan Informatika	
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	DISKOMINFO
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DISKOMINFO
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DISKOMINFO

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISKOMINFO
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
6.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
7.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	DISKOMINFO
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1.	Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	DISDAGNAKER KOPUKM
2.12.	Penanaman Modal	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	DPMPTSP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPMPTSP
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga	
1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISPARPOR
2.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	DISPARPOR
3.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	DISPARPOR
2.14	Statistik	
1.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	DISKOMINFO
2.15.	Persandian	
1.	Program Persandian Daerah	DISKOMINFO
2.16	Kebudayaan	
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	DISDIKBUD
2.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DISDIKBUD
2.17.	Perpustakaan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISARPUS
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISARPUS
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISARPUS
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISARPUS
5.	Program Pengembangan Budaya Baca	DISARPUS
6.	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	DISARPUS
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	DISARPUS
2.18.	Kearsipan	
1.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	DISARPUS
2.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	DISARPUS

5.1.3. Urusan Pilihan

Tabel V.3.
Urusan Pilihan, Program dan Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
3.01.	Kelautan dan Perikanan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISNAKAN
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISNAKAN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISNAKAN
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISNAKAN
5.	Program Pengembangan Usaha Perikanan	DISNAKAN
3.02.	Pariwisata	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPARPOR
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISPARPOR
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISPARPOR
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISPARPOR
5.	Program Pengembangan Pariwisata	DISPARPOR
6.	Program Destinasi Wisata	DISPARPOR
3.03.	Pertanian	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPERTAN
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISPERTAN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISPERTAN
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISPERTAN
5.	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	DISPERTAN
6.	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan	DISPERTAN
7.	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	DISPERTAN
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan	DISPERTAN
9.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DISNAKAN
10.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	DISNAKAN
3.04.	Kehutanan (sudah menjadi kewenangan Provinsi)	
	-	
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	-	
3.06.	Perdagangan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISDAGNAKER KOPUKM
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISDAGNAKER KOPUKM
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISDAGNAKER KOPUKM
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DISDAGNAKER KOPUKM
5.	Program pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar	DISDAGNAKER KOPUKM

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
3.07.	Perindustrian	
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTSP
3.08.	Transmigrasi	
1.	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DISDAGNAKER KOPUKM

5.1.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel V.4.
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Program dan Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
3.01.	Administrasi Pemerintahan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SETDA, SETWAN, KEC
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SETDA, SETWAN, KEC
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SETDA, SETWAN, KEC
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SETDA, SETWAN, KEC
5.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	SETDA
6.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	SETDA
7.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SETDA
8.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	SETDA
9.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	SETDA
10.	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	SETDA
11.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SETWAN
12.	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	KECAMATAN
3.02.	Pengawasan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	INSPEKTORAT
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	INSPEKTORAT
4.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT
5.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEKTORAT
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	INSPEKTORAT
3.03.	Perencanaan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAPERLITBANG
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BAPERLITBANG
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAPERLITBANG
4.	Program peningkatan pengembangan sistem	BAPERLITBANG

No.	URUSAN dan PROGRAM	OPD
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
5.	Program perencanaan pembangunan daerah	BAPERLITBANG
6.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	BAPERLITBANG
7.	Program perencanaan sosial dan budaya	BAPERLITBANG
8.	Program perencanaan prasarana wilayah	BAPERLITBANG
9.	Program perencanaan pengembangan wilayah	BAPERLITBANG
3.04.	Keuangan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD
5.	Program Pengelolaan Aset Daerah	BKD
6.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BKD
7.	Program Perencanaan Anggaran	BKD
3.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKPSDM
5.	Program Peningkatan Informasi dan Pengembangan SDM	BKPSDM
6.	Program Pengangkatan dan mutasi aparatur	BKPSDM
7.	Program Pembinaan Aparatur	BKPSDM
3.06.	Penelitian dan Pengembangan	
1.	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	BAPERLITBANG

5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 serta pendanaannya sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Perkiraan kemampuan pendanaan Tahun 2020 adalah :

Tabel V.5.
Perkiraan Kemampuan Pendanaan Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI TH. 2020
4	PENDAPATAN	2.289.272.697.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	391.590.092.000
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	172.921.519.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.384.709.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.597.990.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	184.685.874.000
4.2.	DANA PERIMBANGAN (Dana Transfer Umum)	1.485.556.354.000

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI TH. 2020
4.2.1	Dana Bagi Hasil	40.241.730.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.078.977.777.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	366.336.847.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	412.126.251.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	85.620.811.000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	132.275.165.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	194.230.275.000
4.3.5	Pendapatan Lainnya	-
Jumlah Pendapatan		2.289.272.697.000

Sumber : BKD, 2019

Pendapatan sebesar Rp. 2.289.272.697.000,00 (dua trilyun, dua ratus delapan puluh sembilan milyar, dua ratus tujuh puluh dua juta, enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditambah dengan perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 185.078.238.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar, tujuh puluh delapan juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) akan diperoleh perkiraan kemampuan pendanaan Tahun 2020.

Angka tersebut harus dikurangi untuk belanja wajib yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah) sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.6.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	URAIAN	Jumlah
1	PENDAPATAN	2.289.272.697.000
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	185.078.238.000
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
	Total Kemampuan Pendanaan 2020	2.474.350.935.000
	Dikurangi	1.077.905.235.000
1.	Gaji Pegawai	1.033.905.235.000
2.	Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Pinjaman	34.000.000.000
3.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	10.000.000.000
	Kapasitas Riil	1.396.445.700.000

Sumber : Baperlitbang 2019, diolah

Dari total kapasitas riil sebesar Rp. 1.396.445.700.000,00 (satu trilyun, tiga ratus sembilan puluh enam milyar, empat ratus empat puluh lima juta, tujuh ratus ribu rupiah) wajib dibelanjakan untuk belanja lainnya seperti :

1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020;
2) Kegiatan Bagi Hasil Pajak Retribusi Desa sebesar 10% (sepuluh persen);
3) Kegiatan Alokasi Dana Desa;
4) Kegiatan Dana Desa sebesar 10%(sepuluh persen) dana Perimbangan tidak termasuk DAK;
5) Kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas (JKN);
6) Kegiatan Dana Kelurahan (sebesar minimal sama dengan ADD terkecil kali 12 kelurahan), dll.

Membandingkan kapasitas riil kemampuan dana dan usulan program kegiatan Perangkat Daerah, sehingga diperoleh program kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai kemampuan pendanaan Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya. Indikator kinerja utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu disusun, di antaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar disusun untuk memberikan pedoman atau panduan pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai oleh instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dicapai.

Adapun matrik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 sebagaimana Tabel VI.1 dan Tabel VI.2

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
1.1.	*Mewujudkan kualitas pembangunan infra struktur yang memadai dan berwawasan lingkungan*	*Rasio konektivitas*	*rasio*	• indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yg akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. • Cara hitung → β = e / v; β = indeks konektivitas; e = jumlah jaringan jalan; v = jumlah kota	*30,00*
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	*Indeks*	• Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. • Cara hitung → IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran udara + 40% Indeks Tutupan Hutan	*62,41*
1.1.1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1) Penurunan Angka Kecelakaan	rasio	• Angka yang menunjukkan jumlah peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda" (Korban jiwa dan Luka Berat). • Cara hitung → R = Jumlah angka kecelakaan tahun lalu dibagi jumlah kecelakaan tahun sekarang	0,69
1.1.2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	• Gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. • Cara hitung → IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran udara + 40% Indeks Tutupan Hutan	66,87
		3) Persentase kawasan kumuh	%	• Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. • Cara hitung → Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi luas kabupaten, kali 100%	0,57
1.1.3.	Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana	4) Persentase Berkurangnya korban bencana alam	%	• Persentase korban bencana alam (serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan); • Cara hitung → K = jml korban tahun ini dibagi jumlah korban tahun lalu kali 100%	0,06

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
2.1	*Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah*	*Tingkat Pertumbuhan ekonomi*	*%*	• Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. • Cara hitung → PE = PDRB tahun berjalan/ PDRB tahun sebelumnya.	*5,8*
		Tingkat inflasi	*%*	• meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang; • Cara hitung → menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya: Indeks harga konsumen (IHK)	*3,10*
		PDRB Perkapita	*Ribu/th/org*	• Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. • Pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. • Cara hitung → Pendapatan perkapita = PDRB / Jumlah penduduk	*28.556*
		Tingkat Pengangguran Terbuka	*%*	• Persentase jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap penduduk usia kerja. • Cara hitung → TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%	*2,86*
2.1.1.	Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian dan perikanan	5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB, pada tahun berkenaan. • Cara hitung → Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, dibagi total PDRB kali 100%	14,51

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
		6) Skor Pola Pangan harapan	Skor	• Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. (data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan). • Cara hitung ➔ hasil perkalian antara proporsi energi dari masingmasing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH.	88
2.1.2.	Meningkat nya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	%	• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB, pada tahun berkenaan. • Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Akomodasi dan Makan Minum, dibagi total PDRB kali 100%	4,75
2.1.3.	Meningkat nya produktivitas sektor perdagangan	8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Perdagangan dalam PDRB, pada tahun berkenaan. • Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Perdagangan, dibagi total PDRB kali 100%	11,45
2.1.4.	Meningkat nya produktivitas sektor indsutri pengolahan	9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor industri pengolahan dalam PDRB, pada tahun berkenaan. • Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor industri pengolahan, dibagi total PDRB kali 100%	46,59
2.1.5.	Meningkat nya nilai investasi daerah	10)Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor	%	• Persentase penambahan akumulasi (Jumlah) suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Persentase Pertumbuhan = Jumlah investasi tahun berkenaan dikurangi jumlah investasi tahun lalu, dibagi jumlah investasi tahun lalu kali 100%.	1,7
2.1.6.	Meningkat nya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	11)TPAK	%	• yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap penduduk usia kerja. • Cara hitung ➔ TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%	70,96

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
3.1.	*Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi*	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	*Indeks*	• Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup, di Kabupaten Karanganyar. • Cara hitung ➔ IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup; X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks ratarata lamasekolah) X(3) Indeks standar hidup layak.	*75,74*
3.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	12)Harapan lama Sekolah	Tahun	• Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. • Cara hitung ➔ $HLS_i^t = \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: HLS_i^t Harapan lama sekolah pada usia a dan pada tahun t E_i^t Partisipasi sekolah penduduk usia i pada tahun t P_i^t Populasi penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i Usia ($a, a+1, \ldots, n$)	13,72
		13)Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	• Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. • Cara hitung ➔ RLS = 1/N x ∑ xi LS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	8,65
3.1.2.	Meningkat nya derajat kesehat an masyarakat	14)Usia harapan Hidup	Tahun	• Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup di Kabupaten Karanganyar dalam tahun tertentu. (banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu). • Cara hitung ➔ Rata-rata usia hidup	77,57

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
4.1	*Terwujudnya pemerataan antar desa*	*Indeks Desa Membangun (IDM)*	*indek*	• indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. • Cara hitung ➔ IDM = 1/3 (IS + IEK + IL) IDM : Indeks Desa Membangun IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi) Tabel 1. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM No | STATUS DESA | NILAI BATAS 1 | SANGAT TERTINGGAL | < 0,491 2 | TERTINGGAL | 0,491 dan < 0,599 3 | BERKEMBANG | 0,599 dan < 0,707 4 | MAJU | 0,707 dan < 0,815 5 | MANDIRI | > 0,815	*0,6436*
4.1.1.	Meningkat nya kemajuan dan kemandirian desa	15)Indeks Ketahanan Sosial	indek	• terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). • Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016	0,647
		16)Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	• indeks komposit yang dibangun dari dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah) • Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016	0,597
		17)Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	• Indeks komposit yang dibangun dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). • Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016	0,687
5.1	*Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender*	*Nilai Kabupaten Peduli HAM*	*Nilai*	• Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. • Cara hitung ➔ Rata-rata capaian semua indikator dibagi jumlah indikator ($\bar{x}$ =1/n kali $\sum x$ dimana $\bar{x}$: Nilai Rata Rata; x : Jumlah Capaian seluruh Indikator; n : Jumlah Kriteria	*79,41*

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	*Indeks*	• Indeks ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan menjadi unsur masyarakat yang digunakan dalam keseharian. • Cara hitung ➔ Rata-rata persentase budaya yang dilestarikan dan persentase kelompok seni budaya yang aktif.	*78*
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga	*Jumlah*	Jumlah Juara yang dihasilkan oleh pemuda Kab. Karanganyar dalam kejuaraan dalam satu tahun,	*20*
		Angka kemiskinan	*%*	• Persentse yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. • Cara hitung ➔ Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk kali 100%	*7,58-8,58*
		IPG (Indeks Pembangungan Gender)	*indeks*	• Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. • Cara hitung ➔ IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki.	*97,20*
5.1.1.	Meningkat nya kualitas keagamaan dalam keberagaman	18)Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	• Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang terjadi dalam satu tahun, yang masuk dalam berita nasional dan regional. • Cara hitung ➔ Hitungan kejadian dalam satu tahun.	135
		19)Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda	%	• Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat atau terlaporkan, dalam satu tahun yang tertangani. • Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	87
		20)Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	• Jumlah kasus yang menimnalkan konflik sosial yang bermuatan Suku, Agama. Ras dan Antar golongan di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	0

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.2.	Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	21)Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	• warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.[• Cara hitung ➔ Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (dilakukan pemeliharaan, perawatan) dalam satu tahun, dibagi jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, yang dimiliki (diwenangi) kabupaten kali 100%	88,1
		22)Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	• Seni Budaya : segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok, yang mana memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang ada di kaba karanganyar. • Cara hitung ➔ Jumlah seni budaya yang aktif (berkegiatan dan tercatat) dalam satu tahun, dibagi jumlah seni budaya, yang dimiliki (terdaftar) kabupaten kali 100%	13,30
5.1.3.	Meningkat nya prestasi pemuda dan olah raga	23)Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional	Unit	• Prestasi kejuaraan pemuda di berbagai bidang selain olah raga, tingkat solo raya (Subosukawonosraten), tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah juara (Juara I s/d Juara Harapan III, Juara Favorit dll) yang dicapai dalam 1 tahun	20
		24)Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional/ internasional	Unit	• Prestasi kejuaraan pemuda di berbagai bidang olah raga, tingkat solo raya (Subosukawonosraten), tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah juara (Juara I s/d Juara Harapan III, Juara Favorit dll) yang dicapai dalam 1 tahun	20

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.4.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	25)Pengeluaran Perkapita	(Rp.juta)	• Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut; • Cara hitung ➔ jumlah pengeluaran satu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga dalam satu bulan.	12,46
		26)Persentase Penanganan PMKS	%	• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. • Cara hitung ➔ Jumlah PMKS yang mendapat penanganan dibagi jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun.	1,75
5.1.5.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak	27)Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. • Cara hitung ➔ rata-rata persentase perempuan di bidang politik (pemerintahan dan DPRD) dan ekonomi (lembaga swasta)	74,66
		28)Kabupaten Layak Anak	Skor	• kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalamkebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak; Cara hitung ➔ berdasarkan hasil evaluasi (Permen PPPA Nomor 14 Tahun 2011).	752
5.2	*Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik*	*Indeks Reformasi Birokrasi*	*Indeks*	• upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. • Cara Hitung ➔ rata-rata nilai indikator RB	*65*

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.1.	Meningkat nya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	29)Indeks SPBE	Indeks	• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi SPBE	2,37
		30)Nilai SAKIP	nilai	• Sakip = Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi SAKIP	65
		31)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	• pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi BPK	WTP
		32)Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	• ukuran statistik yang menunjukkan kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi BKPSDM	80,67
		33)IKM Kabupaten	%	• tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. • Cara Hitung → Hasil Rata-rata IKM OPD Pemkab Karanganyar 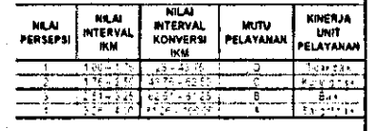 	78,23

No	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020
1	2	3	4	5	6
		34)Maturitas SPIP	Level	• Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi	3
		35)Indeks Arsip	Indeks	• indeks arsip adalah suatu label yang digunakan dalam menentukan kode arsip untuk memudahkan dalam proses penyimpanan arsip. • Cara Hitung → Nilai hasil Evaluasi	79

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
   1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
   2. Fokus kesejahteraan sosial analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja,
   3. Fokus seni budaya dan olahraga analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

II. Aspek pelayanan umum terdiri dari:

1. Fokus layanan urusan pemerintahan wajib analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.
2. Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah.

III. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama dalam bidang

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.
2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur analisis kinerja atas fasilitas wilayah/insfrastruktur.
3. Fokus iklim berinvestasi analisis kinerja atas iklim berinvestasi.

Sedangkan Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	• Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup, di Kabupaten Karanganyar. • Cara hitung □ IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup; X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks ratarata lamasekolah) X(3) Indeks standar hidup layak.	76,99	Baperlit bang
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	• Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. • Cara hitung → $HLS_i^t = \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: HLS_i^t : Harapan lama sekolah pada usia i dan pada tahun t E_i^t : Partisipasi sekolah penduduk usia i pada tahun t P_i^t : Populasi penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i : Usia ($i = a, a+1, \ldots, n$)	13,72	Disdikbud
3.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	• Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. • Cara hitung □ RLS = 1/N x ∑ xi RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	8,65	Disdikbud
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	• Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup di Kabupaten Karanganyar dalam tahun tertentu. (banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu). • Cara hitung → Rata-rata usia hidup	77,32	Dinkes
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	• Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. • Cara hitung → PE = PDRB tahun berjalan/ PDRB tahun sebelumnya.	5,8	Baperlit bang
6.	PDRB per kapita	Juta/th/ org	• Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.	28.556	Baperlit bang

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. • Cara hitung → Pendapatan perkapita = PDRB / Jumlah penduduk		
7.	Angka kemiskinan	%	• Persentse yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. • Cara hitung □ Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk kali 100%	9,01-9,28	Baperlit bang
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	• Persentase jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap penduduk usia kerja. • Cara hitung □ TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%	3,00-3,10	Baperlit bang
9.	PDRB ADHK	Rp. 000	• Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto *(gross value added)* yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, berdasarkan atas harga konstan (harga dasar pada tahun tertentu)	28.650.323	Baperlit bang
10.	PDRB ADHB	Rp. 000	• Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto *(gross value added)* yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, berdasarkan atas harga berlaku (harga dasar pada tahun berkenaan)	38.687.872	Baperlit bang
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.I.	Layanan Urusan Wajib Dasar				
B.I.1	Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	• rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI/Paket A • Cara hitung → APK = jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h, dibagi umlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h, kali 100	100	Disdikbud
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	• rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B	100	Disdikbud

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung → APK = jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h, dibagi umlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h, kali 100		
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	• perbandingan antara siswa usia SD/MI/Paket A pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. • Cara hitung → $\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun di enjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100$	99,80	Disdikbud
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	• perbandingan antara siswa usia SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. • Cara hitung → $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun di enjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100$	74	Disdikbud
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	• ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah SD/MI . • Cara hitung → APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 7–12 tahun) X 100 }	0,06	Disdikbud
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	• ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs. • Cara hitung → APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100}	0,13	Disdikbud
7.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	• Sekolah SD/MI yang kondisinya layak untuk digunakan proses belajarmengajar dengan baik . • Cara hitung → sekolah SD/MI yang baik, dibagi jumlah sekolah kali 100.	79	Disdikbud
8.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	• Sekolah MP/MTs yang kondisinya layak untuk digunakan proses belajarmengajar dengan baik . • Cara hitung → sekolah SD/MI yang baik, dibagi jumlah sekolah kali 100.	80	Disdikbud
B.I.2	Kesehatan				
1.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	• Rata-rata cakupan pelayanan kesehatan yang menjadi standar pelayanan minimum tingkat kabupten. • Cara hitung → total capaian spm dibagi banyaknya spm kali 100	100	Dinkes
2.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	%	• Rata-rata cakupan pelayanan penngendalian penyakit TBC, DBD, Malaria, dan HIV AIDs. • Cara hitung → jumlah persentase capaian pelayanan pengendalian penyakit, dibagi jumlah penyakit kali 100	100	Dinkes
3.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	%	• Cakupan ketersediaan tenaga medis terhadap jumlah penduduk kabupaten dalan tahun tertentu	91	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung → rata-rata persentase capaian rasio tenaga medis yang ada dibagi standar pelayanan kesehatan, kali 100		
4.	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas	%	• Cakupan pelayanan puskesmas dalam satu kabupaten • Cara hitung → jumlah puskesmas dibagi jumlah kecamatan kali100	100	Dinkes
5.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	%	• Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten dalan tahun tertentu • Cara hitung → rata-rata persentase capaian rasio sarpras kesehatan yang ada (rumah sakit, poliklinik) dibagi jumlah penduduk, kali 100	80	Dinkes
6.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	%	• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. • Cara hitung → $\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten}} \times 100\%$	100	Dinkes
B.I.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	• Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik • Cara hitung → panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total panjang jalan kabupaten kali 100	78	DPUPR
2.	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	• Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik • Cara hitung → jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total jembatan kabupaten kali 100	81	DPUPR
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	• Persentase rumah tinggal yang mempunyai sanitasi dalam kondisi baik • Cara hitung → jumlah rumah tinggal bersanitasi dalam kondisi baik, dibagi total rumah tinggal, kali 100	97	DPUPR
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	• Persentase permukiman yang mempunyai drainase dalam kondisi baik (tidak mampet) • Cara hitung → luas permukiman berdrainase dalam kondisi baik, dibagi total luas permukiman, kali 100	35	DPUPR
4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	• Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik • Cara hitung → luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total luas irigasi kabupaten kali 100	70	DPUPR
5.	Persentase penduduk berakses air minum	%	• Penduduk yang mendapat Air Minum Layak (Air minum dengan Jarak ke Tempat Pembuangan Limbah minimal 10 m yang bersumber dari leding, Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung, tidak termasuk air hujan danair kemasan).	48	DPUPR

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung ➔ jumlah penduduk yang memperoleh air minum layak, dibagi total jumlah penduduk, kali 100		
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	• Rumah tangga yang memiliki akses Air Minum Layak (Air minum dengan Jarak ke Tempat Pembuangan Limbah minimal 10 m yang bersumber dari leding, Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung, tidak termasuk air hujan danair kemasan). • Cara hitung ➔ jumlah RT yang memiliki akses air minum layak, dibagi total jumlah penduduk, kali 100	48	DPUPR
7.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	• Daya tampung pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ daya tampung pemakaman umum dibagi jumlah penduduk kali 100	92	DISHUB PKP
8.	Rasio pelayanan jasa konstruksi dengan jumlah kegiatan per tahun anggaran	%	• Jumlah layanan jasa kontruksi di DPUPR dalam satu tahun • Cara hitung ➔ rasio = Jumlah layanan jasa kontruksi di DPUPR, dibagi jumlah kegiatan konstruksi dalam APBD dalam satu tahun.	52	DPUPR
9.	Ketaatan terhadap RTRW	%	• Persentase penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW • Cara hitung ➔ rasio = Luas bangunan (penggunaan lahan) yang sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW, di bagi luas lahan sesuai peruntukkan kali 100.	85	DPUPR
B.I.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	• Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. • Cara hitung ➔ Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi luas kabupaten, kali 100%	6	DISHUB PKP
2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	• Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin, di perkotaan. • Cara hitung ➔ Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi luas perkotaan, kali 100%	6	DISHUB PKP
3.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	• Jumlah rumah tangga di kawasan kumuh di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin, • Cara hitung ➔ Rasio = jumlah rumah tangga kawasan kumuh dibagi jumlah rumah tangga perkotaan, kali 100%	6	DISHUB PKP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
4.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	• Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU; • Cara hitung ➔ $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	52	DISHUB PKP
B.I.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1.	Penurunan Kasus Konflik di Masyarakat	%	• Jumlah kasus yang meminimalkan konflik sosial yang bermuatan Suku, Agama. Ras dan Antar golongan di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	135	BAKES BANGPOL
2.	Persentase Tertanganinya kasus pelanggaran perda	%	• Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat atau terlaporkan, dalam satu tahun yang tertangani. • Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	87	SATPOL PP
3.	Persentase Pengendalian kasus SARA (Tidak Ada Kasus)	%	• Jumlah kasus yang menimnalkan konflik sosial yang bermuatan Suku, Agama. Ras dan Antar golongan di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	0	BAKES BANGPOL
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	• Persentase pelayanan pemadaman peristiwa kebakaran yang di Kabupaten Karanganyar dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ Jumlah kebakaran yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.	100	SATPOL PP
B.I.6	Sosial				
1.	Persentase Penurunan PMKS	%	• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. • Cara hitung ➔ Jumlah PMKS yang mendapat penanganan dibagi jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun.	2,32	DINSOS
2.	Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin	%	• Jumlah KK (RT) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan • Cara hitung ➔ Jumlah KK (RT) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, dibagi jumlah KK miskin, kali 100	5,2	DINSOS

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	%	• Persentase korban bencana alam (serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan); • Cara hitung → K = jml korban tahun ini dibagi jumlah korban tahun lalu kali 100%	100	BPBD
B.II	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
B.II.1	Tenaga Kerja				
1.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	• Persentase pencari kerja yang terdaftar di Dinas, yang ditempatkan / mendapat pekerjaan, dalam satu tahun. • Cara hitung → K = jml pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar kali 100%	86,3	DISDAGNA KERKOP UKM
B.II.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	• Persentase Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dalam satu tahun. • Cara hitung → K = jml perempuan bekerja di lembaga pemerintah dibagi jumlah ASN kali 100%	10	DP3APPKB
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	• Persentase Perempuan yang bekerja sebagai anggota DPRD dalam satu tahun. • Cara hitung → K = jml perempuan di DPRD dibagi jumlah anggota DPRD kali 100%	9	DP3APPKB
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	• Persentase Perempuan yang bekerja di lembaga swasta dibagi jumlah tenaga di lembaga swasta. • Cara hitung → K = jml perempuan di DPRD dibagi jumlah anggota DPRD kali 100%	7	DP3APPKB
4.	Rasio KDRT	%	• Banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat, dibagi jumlah rumah tangga dalam satu tahun • Cara hitung → Jumlah KDRT/Jumlah RumahTangga	13	DP3APPKB
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	• Banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani, dibagi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam satu tahun • Cara hitung → Jumlah Korban tertangani/Jumlah kejadian kali 100%	100	DP3APPKB
6.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	• Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial.	100	DP3APPKB

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung ➔ Banyaknya perempuan korban kekerasan yang dipulihkan, dibagi jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun kali 100%		
B.II.3	Pangan				
1.	Ketersediaan pangan utama	ton	• Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. • Cara hitung ➔ jumlah pangan utama yang tersedia dalam satu tahun	533.004,58	DISPERTAN
2.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/org	• Jumlah pangan yang dikonsumsi perkapita dalam satu hari • Cara hitung ➔ rata rata kalori dikomsumsi per kapita dalam satu hari	1907,1	DISPERTAN
3.	Ketersediaan protein perkapita	%	• Jumlah protein yang dikonsumsi perkapita dalam satu hari • Cara hitung ➔ rata rata kalori dikomsumsi per kapita dalam satu hari	59	DISPERTAN
B.II.4	Pertanahan				
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	• Luas lahan milik pemerintah kabupaten karanganyar yang telah bersertifikat, • Cara hitung ➔ luasa lahan milik pemerintah yang bersertifikat dibagi luas lahan yang dimiliki kali 100%	6	SETDA
B.II.5	Lingkungan Hidup				
1.	Persentase penanganan sampah	%	• volume sampah dalam satu tahun yang berhasil direduksi (ditangani) • Cara hitung ➔ volume sampah yang tertangani dibagi total volume sampah dalam satu tahun kali 100%	60	DLH
2.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	• kecukupan fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan yang tersedia • Cara hitung ➔ fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan yang tersedia, dibagi kebutuhan fasilitas yang seharusnya dalam satu tahun kali 100%	55	DLH
3.	Pencemaran status mutu air	%	• tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkandengan baku mutu air yang ditetapkan. • Cara hitung ➔ dengan metode tertentu (Storet dan atau indeks pencemaran)	66,7	DLH
4.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	• Banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran air, di kabupaten karanganyar dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ jumlah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari air, dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada, kali 100%	87,7	DLH
5.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber	%	• Banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran udara, di kabupaten karanganyar dalam satu tahun.	95	DLH

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
	tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara		• Cara hitung → jumlah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari udara, dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada, kali 100%		
6.	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)	Metric ton	• Banyaknya emisi karbon dioksida, di wilayah pemantauan dalam satu tahun • Cara hitung → hasil survei	9	DLH
7.	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metric ton	Metric ton	• Banyaknya penggunaan bahan bahan perusak ozon untuk kendaraan bermotor, di wilayah pemantauan dalam satu tahun • Cara hitung → hasil survei	4	DLH
8.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	• Banyaknya penggunaan bahan bahan perusak ozon untuk kendaraan bermotor, di wilayah pemantauan dalam satu tahun • Cara hitung → hasil survei	25	DLH
9.	Cakupan rehabilitasi daerah resapan air	%	• Luas wilayah daerah resapan air yang direhabilitasi (dihijaukan), dalam satu tahun. • Cara hitung → hasil survei	70	DLH
10.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal,UKL-UPL, SPPL	%	• Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi pemenuhan izin lingkungan dibandingkan dengan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi izin dalam satu tahun Cara hitung → hasil survei	40	DLH
11.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	• Rasio TPS adalah jumlah TPS per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS yang dibadingkan dengan jumlah penduduk dalam satu kabupaten dalam satu tahun. • Cara hitung : jumlah TPS dibagi jumlah penduduk	75	DLH
12.	Penegakan hukum lingkungan	angka	• Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup; • Cara hitung : Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	98	DLH
13.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	• Persentase tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup; • Cara hitung : Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi pelanggaran yang terlapor dan atau tercatat kali 100%	100	DLH
14.	Presentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan	%	• Persentase luas lahan produksi yang mengalami kerusakan yang ditetapkan; • Cara hitung : Jumlah lahan produksi yang rusak yang tertatat yang diinformasikan ke publik dibagi luas lahan produksi, kali 100%	0	DLH

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
	dan diinformasikan status kerusakannya				
13.	Persentase layanan pengelolaan lumpur tinja	%	• Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Setempat merupakan salah satu rantai pengolahan yang saling berhubungan, dimulai dari sarana setempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan limpur tinja, serta pemanfaatan kembali dan pembuangan. • Cara Hitung : Jumlah SPAL yang ada dibagi jumlah SPAL yang ditargetkan oleh pemerintah kali 100%	75	DPUPR, DLH
14.	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3	%	• Persentase banyaknya usaha yang mengelola Limbah B3 baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. • Cara hitung jumlah usaha pengelolaan B3 yang aktif, dibagi jumlah usaha pengelola limbah B3 yang terdaftar kali 100%	50	DLH
15.	Cakupan IPAL dibangun	%	• Luas wilayah layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang saling berhubungan, dimulai dari sarana setempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan limpur tinja, serta pemanfaatan kembali dan pembuangan. • Cara Hitung : Luas wilayah layanan SPAL yang ada dibagi luas wilayah yang seharusnya terlayani kali 100%	2	DLH
16.	Persentase pemenuhan baku mutu air limbah	nilai	• Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. • Cara hitung : Rata – rata hasil pemantauan dalam 1 tahun	-	DLH
17.	Cakupan ruang terbuka hijau yang tertata	%	• Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman; • Cara hitung : luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah perkotaan kali 100% (Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah)	18	DLH
B.II.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	• Persentase penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik; • Cara hitung : jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, dibagi jumalh penduduk yang wajib memiliki KTP-el kali 100%	85	DISDUK CAPIL
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	• Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran; • Cara hitung : jumlah penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran, dibagi jumlah penduduk usia 0-18 memiliki akte kelahiran kali 100%	85	DISDUK CAPIL

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.	Cakupan pengelolaan database kependudukan	%	• Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran; • Cara hitung : jumlah penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran, dibagi jumlah penduduk usia 0-18 memiliki akte kelahiran kali 100%	85	DISDUK CAPIL
B.II.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	%	• Persentase lembaga perekonomian di desa yang aktif; • Cara hitung : Persentase lembaga perekonomian di desa yang aktif dibagi jumlah lebaga keuangan yang ada di desa kali 100%	75	DISPER MASDES
B.II.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera				
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	• Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga • Cara hitung : jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga, dalam satu tahun	2	DP3APPKB
2.	Rasio akseptor KB	%	• jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. • Cara hitung : jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun dibagi jumlah pasangan usia subur kali 1000 pada tahun yang sama	61	DP3APPKB
3.	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	• Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. • Cara hitung : membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.	61	DP3APPKB
7.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	• Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun yang memiki resiko tinggi dalam melahirkan dan anak dilahirkan. • Cara hitung : jumlah PUS istri dibawah 20 tahun, dibagi jumlah PUS dalam satu tahun	28	
B.II.9	Perhubungan				
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	• Angka yang menunjukkan besaran jumlah arus penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum pada tahun berkenaan • Cara Hitung → Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	2100	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
2.	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	• Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan • Cara Hitung → Jumlah Uji kir angkutan umum pada tahun berkenaan	13.100	
3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	%	• Angka yang menunjukkan jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun berkenaan • Cara Hitung → Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10	
4.	Persentase layanan angkutan darat	%	• Angka yang menunjukkan besaran angkutan darat yang mampu melayani penumpang pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat pada tahun berkenaan dikali 100%	31	
5.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	• Angka yang menunjukkan besaran angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah angkutan umum yang telah memiliki KIR dibagi jumlah seluruh angkutan umum pada tahun berkenaan dikali 100%	10	
6.	Pemasangan Rambu-rambu	%	• Angka yang menunjukkan besaran rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang dibagi jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas pada tahun berkenaan dikali 100%	20	
7.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	unit	• Angka yang menunjukkan jumlah Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun • Cara hitung → Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2100	
8.	Persentase penurunan angka kecelakaan pada lalu lintas	%	• Angka yang menunjukkan jumlah peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda" (Korban jiwa dan Luka Berat). • Cara hitung → R = Jumlah angka kecelakaan tahun lalu dibagi jumlah kecelakaan tahun sekarang	9	
B.II.10	Komunikasi dan Informatika				
1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	• Angka yang menunjukkan besaran penduduk yang menggunakan hp/telepon pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah penduduk yang menggunakan hp/telepon dibagi jumlah seluruh penduduk pada tahun berkenaan dikali 100%	40	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	• Angka yang menunjukkan jumlah rumah tangga dengan akses internet pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah rumah tangga dengan akses internet dibagi jumlah seluruh rumah tangga pada tahun berkenaan dikali 100%	40	
3.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	• Angka yang menunjukkan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibagi jumlah seluruh rumah tangga pada tahun berkenaan dikali 100%	40	
4.	Proporsi fasum yang sudah memiliki wifi/hotspot	%	• Angka yang menunjukkan jumlah fasum yang sudah memiliki wifi/hotspot pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah fasum yang sudah memiliki wifi/hotspot dibagi jumlah seluruh fasum pada tahun berkenaan dikali 100%	60	
B.II.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	• Angka yang menunjukkan persentase jumlah Koperasi aktif pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah semua Koperasi di Kabupaten karanganyar pada tahun berkenaan	30	
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	unit	• Angka yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun berkenaan	16.483	
B.II.12	Penanaman Modal				
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	• Angka yang menunjukkan besaran peningkatan jumlah investor pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah investor pada tahun berkenaan dikurangi jumlah investor tahun sebelumnya, dibagi jumlah investor tahun sebelumnya dikali 100%	5	
B.II.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
1.	Cakupan pembinaan olahraga	%	• Angka yang menunjukkan cakupan pembinaan olahraga oleh Pemda pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar pada tahun berkenaan dikali 100%	40	
B.11.15	Persandian				
1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan	%	• Angka yang menunjukkan jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	87	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
	pengamanan informasi dan persandian		• Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dibagi seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%		
B.II.16	Kebudayaan				
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	• Angka yang menunjukkan besaran jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang mendapatkan upaya pelestarian dan perlindungan dari Pemda • Cara hitung → Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang mendapatkan upaya pelestarian dan perlindungan dari Pemda dibagi jumlah seluruh benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diusulkan pada tahun berkenaan dikali 100%	87	
B.II.17	Perpustakaan				
1.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	• Angka yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan	86,4	
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	%	• Angka yang menunjukkan besaran ketersediaan bahan pustaka pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah ketersediaan bahan pustaka dibagi jumlah kebutuhan bahan pustaka yang seharusnya tersedia pada tahun berkenaan dikali 100%	86,4	
B.II.18	Kearsipan				
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	• Angka yang menunjukkan besaran perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%	86,4	
B.III	Layanan Urusan Pilihan				
B.III.1	Kelautan dan Perikanan				
1.	Produksi perikanan	Ton	• Angka yang menunjukkan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan	2.342.238	
2.	Konsumsi ikan	Kg/org/th	• Angka yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan	18,45	
B.III.2	Pariwisata				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
1.	Peresentase kenaikan Kunjungan wisata	%	• Angka yang menunjukkan besaran kenaikan kunjungan wisata pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah kumjungan wisata pada tahun berkenaan dikurangi jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya, dibagi jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya dikali 100%	20	
B.III.3	Pertanian				
1.	Cakupan bina kelompok petani	%	• Banyaknya kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemda pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda dibagi Jumlah kelompok tani pada tahun berkenaan dikali 100%	55	
B.III.6	Perdagangan				
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	• Angka yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal pada tahun berkenaan dikali 100%	55	
2.	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	%	• Angka yang menunjukkan besaran kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD • Cara hitung → Besaran Pendapatan Pasar dibagi besaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan dikali 100%	55	
B.III.7	Perindustrian				
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	• Angka yang menunjukkan besaran pertumbuhan IKM pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah IKM pada tahun berkenaan dikurangi jumlah IKM tahun sebelumnya, dibagi IKM jumlah tahun sebelumnya dikali 100%	55	
B.III.8	Transmigrasi				
1.	Persentase transmigran swakarsa	%	• Angka yang menunjukkan persentase pelaku transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan sendiridan biaya sendiri, sedangka pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya • Cara hitung → Jumlah transmigran swakarsa dibagi jumlah seluruh transmigran pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
B.IV.	Penunjang Urusan				
B.IV.1	Administrasi Pemerintahan				
1.	Persentase realisasi kegiatan	%	• Persentase jumlah realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu pada tahun berkenaan	100	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
	pembangunan yang tepat waktu		• Cara hitung → Jumlah realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh realisasi kegiatan pembangunan pada tahun berkenaan dikali 100%		
2.	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	%	• Persentase jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan • Cara hitung → Jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan dibagi jumlah seluruh fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
3.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	%	• Persentase jumlah agenda kerja DPRD yang terealisasi • Cara hitung → Jumlah agenda kerja DPRD yang terealisasi dibagi jumlah seluruh agenda kerja DPRD pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
4.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	• Persentase jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah seluruh kegiatan DPRD pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
B.IV.2	Pengawasan				
1.	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	%	• Persentase jumlah perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%	100	
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	%	• Persentase jumlah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK yang ditindaklanjuti pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%	100	
3.	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	%	• Persentase jumlah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
4.	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	%	• Persentase jumlah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh laporan gratifikasi yang masuk pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
5.	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	%	• Persentase jumlah perangkat daerah yang mempunyai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun berkenaan	100	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang mempunyai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%		
B.IV.3	Perencanaan Pembangunan				
1.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	• Persentase jumlah program di dalam RPJMD yang berada di RKPD pada tahun berkenaan Cara hitung → Jumlah program RPJMD yang berada di dalam RKPD dibagi jumlah seluruh program RPJMD pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
2.	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	• Persentase jumlah program di dalam RKPD yang berada di APBD pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah program RKPD yang berada di dalam APBD dibagi jumlah seluruh program RKPD tahun berkenaan dikali 100%	100	
3.	Persentase keterisian data/informasi	%	• Persentase jumlah data/informasi yang terisi pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah data/informasi yang terisi dibagi jumlah seluruh data/informasi yang harus terisi pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
B.IV.4	Keuangan				
1.	Persentase realisasi PAD	%	• Persentase jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah seluruh Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
2.	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	• Persentase jumlah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Cara hitung → Jumlah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah seluruh klasifikasi dan kode rekening belanja dikali 100%	100	
3.	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	%	• Persentase jumlah realisasi belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi jumlah seluruh belanja Perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%	100	
4.	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	%	• Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan	100	
B.IV.5	Kepegawaian				
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	%	• Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jumlah keseluruhan layanan administrasi kepegawaian yang ada kali 100%.	100	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
2.	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	%	• Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali 100%.	100	
3.	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	%	• Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali 100%.	100	
4.	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	%	• Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG • Cara hitung → Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi kepegawaian yang ada kali 100%.	100	
B.IV.6	Pendidikan dan Pelatihan				
1.	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	%	• Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah keseluruhan pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT kali 100%.	100	
2.	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	%	• Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pada tahun berkenaan • Cara hitung → Jumlah ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun dibagi jumlah keseluruhan ASN kali 100%.	100	
B.IV.7	Penelitian dan Pengembangan				
1.	Persentase penerapan hasil inovasi	%	• Persentase jumlah hasil inovasi yang diterapkan Cara hitung → Jumlah hasil inovasi yang diterapkan dibagi jumlah keseluruhan hasil inovasi yang diusulkan kali 100%.	100	
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.	Pengeluaran Perkapita	Juta/th/org	• Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut; • Cara hitung → jumlah pengeluaran satu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga dalam satu bulan.	12,46	
4.	Angka kriminalitas	%	• Jumlah seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarkat, atau pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian pada satu tahun;	0.014	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	Target 2020	OPD Pengampu
1	2	3	4	5	6
			• Cara hitung ➔ Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi Jumlah penduduk dikali 10.000		
5.	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi	%	• Persentase penambahan akumulasi (Jumlah) suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan dalam satu tahun. • Cara hitung □ Persentase Pertumbuhan = Jumlah investasi tahun berkenaan dikurangi jumlah investasi tahun lalu, dibagi jumlah investasi tahun lalu kali 100%.	1,7	
7.	Indeks Kuailitas Lingkungan Hidup	Nilai	• Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. • Cara hitung ➔ IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran udara + 40% Indeks Tutupan Hutan	66,87	

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01.	*Pendidikan*			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%		Disdikbud
2.	Penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%		Disdikbud
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99	Disdikbud
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	71	Disdikbud
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	Disdikbud
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,05	Disdikbud
7.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	Disdikbud
8.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99	Disdikbud
9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	Disdikbud
1.02	*Kesehatan*			
1	Cakupan Pelayanan Ibu hamil K4 sesuai standar	%	95,05	Dinkes
2	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
3	Persentase komplikasi neonatal yang ditangani	%	100	Dinkes
4	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	83	Dinkes
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	Dinkes
6	cakupan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	%	92	Dinkes
7	Cakupan Pelayanan anak Balita sesuai standar	%	90	Dinkes
8	Cakupan penjaringan siswa kelas 1-7	%	100	
9	Cakupan keluarga sadar gizi	%	83	Dinkes
10	prevalensi balita stunting	%	<25	Dinkes
11	prevalensi balita buruk	%	<0,5	Dinkes
12	Cakupan desa/kelurahan terjangkit KLB ditangani	%	100	Dinkes
13	Pencapaian Universal Child Immunization (UCI)	%	177,00	Dinkes
14	Cakupan Pelayanan P2PTM (HT, DM, ODGJ) sesuai standart	%	100	Dinkes
15	Cakupan Pelayanan P2PM (DBD, TB, HIV, IMS, Malaria, Kusta, Ispa, Diare, Leptospirosis, Filariasis) sesuai standart	%	100	Dinkes
16	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	%	100,00	Dinkes
17	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	%	92,00	Dinkes
18	Rasio dokter per satuan penduduk	nilai	1/4.750	Dinkes
19	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	nilai	1/27.150	Dinkes
20	Rasio perawat per satuan penduduk	nilai	1/1.170	Dinkes
21	Rasio bidant per satuan penduduk	nilai	1/1.750	Dinkes
22	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan maskin dan tidak mampu	%	100	Dinkes
23	Nilai IKS Kabupaten	nilai	0,21	Dinkes
24	cakupan PIRT yang mendapatkan pelayanan rekomendasi ijin edar	%	100	Dinkes
25	cakupan Rumah Makan dan Restoran yang menda patkan pelayanan sertifikat laik sehat	%	100	Dinkes
29	Persentase Desa STBM	%	55,00	Dinkes / DLH / DishubPKP
1.03	*Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			
1.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70,00	DPUPR

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
2.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	35	DPUPR
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97	DPUPR
4.	Persentase penduduk di wilayah perdesaan berakses air minum layak	%	48,00	DPUPR
5.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	85	DPUPR
6.	Persentase penyusunan Perda RDTR	%	30	DPUPR
7.	Rasio pelayanan jasa konstruksi dengan jumlah kegiatan per Tahun	%	52	DPUPR
8.	Persentase Jasa Konstruksi yang menerima Pembinaan	%	73	DPUPR
9.	Menurunnya Persentase tender gagal	%	9	Setda
10.				
1.04.	*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*			
1.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	92	DishubPKP
2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	6	DishubPKP
1.05.	*Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*			
1	Persentase kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	Bakesbangpol
2	Persentase penyelesaian masalah konflik agama	%	100	Bakesbangpol
3	Persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara	kec	17 kec	Bakesbangpol; Setda
4	Persentase ke giatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	Bakesbang pol
5	Persentase pem berdayaan ma syarakat untuk menjaga ketertib an dan keamanan	%	100	Bakesbang pol
6	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	100	Bakesbang pol
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	100	Bakesbang pol
8	Cakupan layanan pemeliharaan kamtramtibmas	%	100	Satpol PP
9	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	75,00	BPBD
10	Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	54,00	BPBD
11	Persentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	65,00	BPBD
12	Jumlah Relawan Bencana	%	0,30	BPBD
13	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80,00	BPBD
14	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap	%	50,00	BPBD
15	Kesiagaan dan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	%	100	Satpol PP
1.06.	*Sosial*			
1	Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya yang diberdayakan	%	100	Dinsos
2	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	Dinsos; Setda
3	Persentase pembinaan anak terlantar	%	100	Dinsos
4	Persentase kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat	%	100	Dinsos
5	Persentase pembinaan panti asuhan dan orang jompo di panti	%	100	Dinsos
6	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	100	Dinsos
7	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	100	Dinsos / Kesra Setda
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
2.01.	*Tenaga Kerja*			
1.	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	100	Disdagnakerkop
2.02	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*			
1.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum	%	24	DP3APPKB
2.	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapat kan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	DP3APPKB
3.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih di Puskesmas	%	100	DP3APPKB
4.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	DP3APPKB
5.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	10	DP3APPKB
6.	cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	%	10	DP3APPKB
7.	Persentase PPRG	%	1,5	DP3APPKB
8.	IPG	%	71	DP3APPKB
9.	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	12	DP3APPKB
10.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10	DP3APPKB
11.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	7	DP3APPKB
12.	Cakupan perem puan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	DP3APPKB
13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	DP3APPKB
14.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan perempuan dalam unit terpadu	%	100	DP3APPKB
15.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	DP3APPKB
16.	cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	DP3APPKB
17.	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan	%	100	DP3APPKB
18.	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	DP3APPKB
2.03.	Pangan			
1.	Produksi pangan Utama	kg	497.905,85	Dispertan
2.	Ketersediaan energi per kapita		1.858,5	Dispertan
3.	Ketersediaan protein per kapita		59,00	Dispertan
4.	Persentase sertifikasi pangan segar	%	4	Dispertan
2.04.	*Pertanahan*			
1.	Persentase luas lahan PSU bersertifikat	%	6	Dishub PKP
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%		Setda
3.	Penyelesaian izin lokasi	%		DPMPTSP
2.05.	*Lingkungan Hidup*			
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	53	DLH; Disdagna kerkop
2.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R			DLH
3.	Pencemaran status mutu air	%	67	DLH
4.	Penegakan hukum lingkungan	%	98	DLH

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
5.	Persentase jumalah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminis tratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	95	DLH
6.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	88	DLH
7.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	25	DLH
8.	Cakupan pengelolaan Fasum RTH Milik Pemkab	lokasi	14	Dishub PKP
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	-	Disdukcapil
2.	Ketersediaan database kependudukan	%	-	Disdukcapil
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Persentase Infrastruktur desa yang dibangun	desa	162	Dispermasdes
2.	Persentase kualitas lembaga desa/kel dan aparatur desa kapasitas baik	%	80	Dispermasdes
3.	Persentase desa penyelenggaraan pemdes yang baik	%	78	Dispermasdes
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,94	DP3APPKB
2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,94	DP3APPKB
3.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	DP3APPKB
4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	org	2	DP3APPKB
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	28	DP3APPKB
6.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18	DP3APPKB
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61	DP3APPKB
8.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61	DP3APPKB
9.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	org	2	DP3APPKB
10.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	2	DP3APPKB
11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22	DP3APPKB
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1	DP3APPKB
13.	Ratio Akseptor KB	%	61	DP3APPKB
14.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	61	DP3APPKB
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14	DP3APPKB
16.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	DP3APPKB
17.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	57	DP3APPKB
18.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	61	DP3APPKB
19.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	buah	23	DP3APPKB
20.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	3	DP3APPKB

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
21.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	1	DP3APPKB
22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1	DP3APPKB
23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	3	DP3APPKB
24.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	24	DP3APPKB
25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	4	DP3APPKB
26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	DP3APPKB
27.	jumlah BKB HI	buah	37	DP3APPKB
2.09.	Perhubungan			
1.	Jumlah Terminal	lokasi	10	Dishub PKP
2.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Pada Lalu Lintas	%	9	Dishub PKP
3.	Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalulintas (APILL)	buah	8,00	Dishub PKP
4.	Jumlah pengelola parkir	titik	20	Dishub PKP
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org/th	208.000	Dishub PKP
6.	Persentase layanan angkutan darat	%	31	Dishub PKP
7.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	org/th	208.000	Dishub PKP
8.	Jumlah pelayanan angkutan lebaran	bus	32	Dishub PKP
9.	Pemasangan Rambu-rambu	unit	100	Dishub PKP
10.	Pemasangan perlengkapan penunjang keselmatan pengguna jalan	buah	10	Dishub PKP
11.	Jumlah alat uji yang diganti	unit	2	Dishub PKP
12.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	unit	719	Dishub PKP
13.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	5	Dishub PKP
14.	Jumlah pelanggar lalulintas yang ditindak	orang/th	41	Dishub PKP
15.	Jumlah bangunan yang mendpat persetujuan Andalalin	buah	10	Dishub PKP
2.10.	*Komunikasi dan Informatika*			
1	Jumlah update informasi di website resmi Pemerintah Daerah	buah	1.200	Diskominfo
2	Persentase media masa yang mengakses informasi pembangunan di Kabupaten Karanganyar	%	100	Diskominfo
3	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	%	100	Diskominfo/ Setda
2.11.	*Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*			
1	Persentase Sarana dan Prasarana ekonomi yang memenuhi standar	%	100	Disdagnakerkop
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja terhadap UMKM	%	34,03	Disdagnakerkop
3	Persentase Sarana dan Prasarana ekonomi yang memenuhi standar	%	100	Disdagnakerkop Setda
4	Persentase Sarana dan Prasarana ekonomi yang memenuhi standar	%	100	Disdagnakerkop
2.12.	*Penanaman Modal*			
1	Peningkatan jumlah investor	rupiah	19,5	DPMPTSP
2	kemudahan penyelesaian perizinan/Persentase jumlah izin usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	unit	160	DPMPTSP; Bag Perekonomian
3	prosentasi peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	unit	16.483	DPMPTSP

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
4	Persentase kenaikan jumlah perilaku usaha	unit	165	DPMPTSP
5	persentase unit usaha yang memenuhi standar mutu	unit	50	DPMPTSP
2.13.	*Kepemudaan dan Olah Raga*			
1.	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%	40	Dispapora
2.	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	40	Dispapora
3.	Persentase cabang olahraga yang terbina	%	40	Dispapora
2.14.	*Statistik*			
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	92	Baperlitbang
2.	Tersedianya informasi data/ statistik yang valid dan terintegrasi	buku	470	Diskominfo
2.15.	*Persandian*			
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah			
2.16.	*Kebudayaan*			
1.	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya	%	78	Disdikbud
2.	Persentase pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya	%	87	Disdikbud
2.17.	*Perpustakaan*			
1.	Terciptanya pengembangan budaya baca (jml perpus aktif)	%	100	Disarpus
2.	Terciptanya program penibgkatan layanan perpustakaan (optimalisasi pengunjung perpust)	%	100	Disarpus
3.	Terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	Disarpus
4.	Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	%	100	Disarpus
5.	Terciptanya peningkatan kualitas pelauyanan informasi	%	100	Disarpus
2.18.	*Kearsipan*			
1.	Terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan		100	Disarpus; Disdukcapil
2.	Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah		100	Disarpus
3.	Terciptanya peningkatan kualitas pelauyanan informasi		100	Disarpus
3	*URUSAN PILIHAN*			
3.01.	*Kelautan dan Perikanan*			
1.	Produksi Perikanan Budidaya	kg	1.758.030	Disnakan
2.	Produksi Perikanan Tangkap	kg	584.208	Disnakan
3.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kap. /Th	18,45	Disnakan
3.02.	*Pariwisata*			
1	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang terpelihara	%	40	Disparpora
2	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	40	Disparpora
3	Persentase meningkatnya jumlah lembaga mitra pariwisata	%	40	Disparpora
4	persentase meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	%	40	Disparpora
3.03.	*Pertanian*			
1.	Produksi Tanaman pangan			Dispertan
	1) Padi	kg	308.202	Dispertan
	2) Jagung	kg	25.077	Dispertan
	3) Kedelai	kg	199	Dispertan
	4) Kacang tanah	kg	2.150	Dispertan
	5) Ubi kayu	kg	80.488	Dispertan
	6) Ubi jalar	kg	31.201	Dispertan

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
2.	Produksi tanaman hortikultura			Dispertan
	1) Bawang Putih	kg	871	Dispertan
	2) cabai besar	kg	1.799	Dispertan
	3) Cabai rawit	kg	293	Dispertan
3.	*Produksi Tanaman Perkebunan*			Dispertan
	1) Kopi	kg	6,84	Dispertan
	2) Cengkeh	kg	130,31	Dispertan
	3) kakao	kg	23,58	Dispertan
	4) Kelapa	kg	1.019	Dispertan
	5) Kelapa Hibrida	kg		Dispertan
	6) Tembakau	kg	618,22	Dispertan
	7) Tebu	kg	4.921,88	Dispertan
	8) Pala	kg	0,08	Dispertan
4.	Persentase ketersediaan sarana pertanian			Dispertan
	1) pupuk	%	75	Dispertan
	2) bibit	%	45	Dispertan
5.	Persentase prasarana pertanian dlm kondisi baik	%	50	Dispertan
6.	Persentase UPJA berkembang baik	%	45	Dispertan
7.	Persentase kelompok tani yang dibina	%	55	Dispertan
8.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang *berkembang baik*	%	60	Dispertan, Bag. Perekonomian
9.	Persentase jenis produk unggulan	%	60	Dispertan
10.	Persentase derajat kesehatan hewan	%	2	Disnakan
11.	Peningkatan Populasi			Disnakan
	1) Ternak besar	ekor	66.576	Disnakan
	2) Ternak kecil	ekor	199.989	Disnakan
	3) Unggas	ekor	10.120.495	Disnakan
	4) Aneka ternak	ekor	542.030	Disnakan
12.	Promosi hasil peternakan	kali	2	Disnakan
13.	Angka kelahiran pedet meningkat	ekor	9.235	Disnakan
3.04.	Kehutanan			
1.				
2.				
3.				
3.05.	*Energi dan Sumber Daya Mineral*			
1.	Persentase *pertambangan tanpa ijin*	%	na	Bag. Perekonomian
3.06.	*Perdagangan*			
1	Persentase Disparistas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	%	100	Disdagnakerkop
2	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	100	Disdagnakerkop
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Usaha	%	100	Disdagnakerkop
3.07.	*Perindustrian*			
4	Persentase jumlah industri kecil yang menggunakan teknologi baru	unit	65	DPMPTSP
5	Persentase kenaikan jumlah industri kecil di tempat - tempat potensial	unit	40	DPMPTSP
3.08.	*Transmigrasi*			
1	Persentase transmigran swakarsa	%	100	Disdagnakerkop
4	*URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*			
4.01.	*Administrasi Pemerintahan*			
1	Persentase Informasi Keluaran Aktifitas DPRD yang dipublikasikan	%	100	Setwan
2	Persentase Desa yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	Setda
3	Persentase aparatur pemerintahan desa yang menguasai administrasi desa	%	100	Setda

NO	Urusan dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5
4	Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	Setda
5	Kepastian Kepemilikan Tanah Pemkab	%	100	Setda
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	Setda
7	Penambahan Investasi	%	100	Setda
8	Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	Setda
4.02.	*Pengawasan*			
1	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	%	92	Inspektorat
2	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	%	100	Inspektorat
3	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP pada level terdifinisi	OPD	17	Inspektorat
4	Rasio penyapaian LHKPN dengan wajib lapor LHKPN	%	100	Inspektorat
5	Rasio penyapaian LHKASN dengan wajib lapor LHKASN	%	87	Inspektorat
6	Prosentasi laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	Inspektorat
7	Rasio Pemenuhan Kebutuhan APIP	%	43	Inspektorat
4.03.	*Perencanaan*			
1	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan	%	96	Baperlitbang
2	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	%	89	Baperlitbang
3	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	%	94	Baperlitbang
4	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	89	Baperlitbang
5	Capaian jumlah program yang memenuhi target perencanaan tata ruang	%	89	Baperlitbang
4.04.	*Keuangan*			
1	Persentase laporan keuangan OPD lengkap dan tepat waktu	%	90	BKD
2	Persentase APBD dengan RKPD	%	90	BKD
3	Persentase laporan aset sesuai SAP	%	80	BKD
4.05.	*Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*			
1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	100	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pembinaan	%	100	BKPSDM
4.06.	*Penelitian dan Pengembangan*			
1	Fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	94	Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang, 2019

BAB VII
PENUTUP

RKPD Tahun 2020 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2020, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2020.

Kaidah pelaksanaan dokumen RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan, termasuk warga masyarakat dan dunia usaha turut berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan atau APBN/BLN semua Perangkat Daerah (PD) harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun Anggaran 2020.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2020, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar wajib melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi RKPD Tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 yang memuat prioritas dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO